AKUNTABILITAS ORGANISASI NON PEMERINTAH YAYASAN BADAK INDONESIA (Studi Pada Program *Sumatran Rhino Sanctuary*)

Skripsi

Oleh

UUN NURAINI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

ABSTRACT

ACCOUNTABILITY OF NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION YAYASAN BADAK INDONESIA

(Study on the Program of the Sumatran Rhino Sanctuary)

By

UUN NURAINI

Nowadays accountability in the development of good governance it is not longer an obligation for the institution of Government, but it has become a liability for nearly all types of organizations, non-governmental organizations are no exception. NGOs can grow and develop rapidly in Indonesia because the definition of pure as the organization that represents the interests of the community. A lot of support in the form of morally up to financially given by Government, private or donor agencies. It underlies the importance of demanding accountability NGOs. Sumatran Rhinos Sanctuary is a program of the non profit organization named Yayasan Badak Indonesia which is engaged in the Sumatran Rhinoceros conservation activities focus. Social reasons of the formation of SRS conservation is increasingly reduced number of Sumatran Rhinoceros so putting Sumatran Rhinoceros as rare animals with a high threat of status according to the International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources of the year 2011. In addition, the conservation of the Sumatran Rhinoceros is also a step in reducing global warming. This research uses qualitative research type with grounded theory approach. Then the technique of data collection was done through interviews, observation and documentation. The results of this research show that there are things that become supporters of the success of the SRS, namely leadership capability, good internal coordinate system, good communication with partners, standards activities and a clear division of tasks, evaluation and accountability, maintain relations with the public, and maintain the trust of donors.

Key words: Accountability, Non Governmental Organization, SRS

ABSTRAK

AKUNTABILITAS ORGANISASI NON PEMERINTAH YAYASAN BADAK INDONESIA
(Studi pada Program *Sumatran Rhino Sanctuary*)

Oleh

UUN NURAINI

Akuntabilitas dalam perkembangan *good governance* saat ini bukan lagi menjadi kewajiban bagi lembaga pemerintah saja, tetapi sudah menjadi kewajiban bagi hampir semua jenis organisasi, tidak terkecuali Organisasi Non Pemerintah. Ornop dapat tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia karena definisi murninya sebagai organisasi yang merepresentasikan kepentingan masyarakat. Banyak dukungan berupa moral sampai dengan finansial yang diberikan oleh pemerintah, swasta atau lembaga donor. Hal ini yang mendasari pentingnya menuntut akuntabilitas dari Ornop-Ornop tersebut. *Sumatran Rhinos Sanctuary* adalah program dari organisasi non profit bernama Yayasan Badak Indonesia yang bergerak pada fokus kegiatan konservasi badak sumatera. Alasan sosial terbentuknya konservasi SRS adalah karena semakin berkurangnya jumlah badak sumatera sehingga menempatkan badak sumatera sebagai hewan langka dengan status keterancaman tinggi menurut *International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources* tahun 2011. Selain itu, konservasi badak sumatera juga merupakan langkah dalam mengurangi pemanasan global. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *grounded theory*. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada hal-hal yang menunjukkan keberhasilan akuntabilitas program SRS, yaitu kepemimpinan yang berkemampuan, sistem kordinasi internal yang baik, komunikasi yang baik dengan mitra, standar kegiatan dan pembagian tugas yang jelas, evaluasi dan pertanggungjawaban, menjaga relasi dengan publik, dan menjaga kepercayaan donor.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Organisasi Non Pemerintah, SRS

AKUNTABILITAS ORGANISASI NON PEMERINTAH YAYASAN BADAK INDONESIA (Studi Pada Program *Sumatran Rhino Sanctuary*)

Oleh

UUN NURAINI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

Judul Skripsi	:	**AKUNTABILITAS ORGANISASI NON PEMERINTAH YAYASAN BADAK INDONESIA (Studi pada Program *Sumatran Rhino Sanctuary*)**
Nama Mahasiswa	:	Uun Nuraini
No. Pokok Mahasiswa	:	1316041075
Jurusan	:	Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.	**Selvi Diana Meilinda, S.A.N., M.P.A.**
NIP 19750720 200312 1 002	NIP

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.
NIP 19750720 200312 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.** .....

   Sekretaris : **Selvi Diana Meilinda, S.A.N., M.P.A.** .....

   Penguji Utama : **Syamsul Ma'arif, S.IP., M.Si.** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Syarief Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **25 Juli 2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 25 Juli 2017

Yang membuat pernyataan,

UUN NURAINI

NPM. 1316041075

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Uun Nuraini, dilahirkan pada 07 Juli 1995 di Desa Sumber Mulyo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupten OKU Timur, Sumatera Selatan dari pasangan Bapak Ahmad Riyadi dan Ibu Muslikhah. Penulis memiliki dua kakak perempuan bernama Khusnul Khotimah dan Nurul Azizah, serta satu adik laki-laki bernama Zen Mustofa.

Penulis memulai pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama (MINU) Sumber Mulyo tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Islamiyah (MTsI) Sumber Mulyo tahun 2007. Penulis menempuh pendidikan lanjutan di SMA Muhammadiyah 2 Karang Tengah dan aktif sebagai Ketua Ranting Ikatan Pemuda Muhammadiyah (IPM) tahun 2011/2012. Penulis juga atif dikegiatan ekstrakulikuler Pramuka dan Marching Band Gita Buana Syailendra. Penulis juga pernah menjadi Ketua Bidang Advokasi IPM Kabupaten OKU Timur tahun 2011/2012.

Penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada tahun 2013 melalui jalur SBMPTN. Penulis berkesempatan berorganisasi di HIMAGARA dan menjadi bendahara umum tahun 2015/2016, menjadi staf di Kementrian Pendidikan dan Kepemudaan BEM U KBM Unila tahun 2013/2014 dan 2014/2015, serta menjadi anggota Bidang Kaderisasi FSPI FISIP Unila tahun 2013/2014 dan 2014/2015.

MOTO

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

(QS.94:5-6)

Segala yang kamu putuskan, seberat apapun itu, jalani. Jangan menyerah ditengah jalan, itu artinya kamu kalah dua kali.

(Ibuku: Muslikhah)

Berbuat baik terhadap mereka yang telah merendahkanmu, menghina dan mencacimu, adalah sebuah kemenangan. Membalas mereka dengan hal yang sama tidak akan membuatmu lebih baik dari mereka. Orang cerdas paham kapan harus berbicara.

(Uun Nuraini)

Alloh itu baik, tidak pernah meninggalkanmu. Jangan salahkan DIA atas nama takdir jika kamu tetap dalam keburukan. Seburuk apapun kamu, hidayahNYA selalu menghampirimu, hanya saja kamu enggan mengakui dan mengambilnya.

(Uun Nuraini)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamiin, puji syukur kepada Alloh SWT yang sangat baik telah meridhoi penyusunan skripsi ini dengan banyak pelajaran yang disisipkan oleh NYA selama proses penyusunan skripsi berlangsung.

Terimakasih yang tak terhitung untuk kedua orangtuaku:

Bapakku tercinta, Ahmad Riyadi

Ibuku tercinta, Muslikhah

Kedua kakak perempuanku, serta si bungsu

Terimakasih guru, murobbi, dosen, teman-teman, dan seluruh pihak yang membantu

SANWACANA

Alhamdulillah, dengan yakin atas rencana Alloh SWT beserta segala rahmat, rohmaan, dan rohiim NYA, skripsi dengan judul Akuntabilitas Organisasi Non Pemerintah (Studi Pada Program *Sumatran Rhino Sanctuary*) ini telah selesai pada waktu terbaik menurut perencanaanNYA.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari ada banyak sekali pihak yang membantu dari berbagai aspek, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orangtuaku: bapak yang tegas, terimakasih telah menanamkan nilai-nilai hidup yang kuat. Terimakasih karena setiap kesulitanku nyatanya aku selalu memikirkanmu, setiap lelahku aku selalu merindukan pundakmu. Ibuku yang super cemas, maaf telah berkali-kali membuatmu shock karena berkali-kali aku harus dirawat di Rumah Sakit. Sekarang ibu gak perlu khawatir, aku sudah jarang sakit. Terimakasih telah mendidik kami dengan baik. Semoga Alloh memberikan kesehatan dan umur panjang, sehingga aku punya kesempatan untuk berbakti lebih lama terhadap kalian. Semoga Alloh menjaga kalian dalam rahmat, dalam keimanan dan ketaqwaan terhadapNYA. Semoga kelak, aku, ibu, bapak, mbak, dan adek berkumpul di jannah NYA. aamiin
2. Bapak Dedy Hermawan, S.Sos, M.Si, selaku dosen pembimbing utama sekaligus ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Terimakasih banyak atas

bimbingan, arahan, ilmu, waktu, nasehat, dan tenaga selama ini. Terimakasih telah menjadi mentor yang baik, yang telah mengajari caraku berfikir dan berkembang, bukan menyuapi dan memaksakan kehendak. Terimakasih banyak pak, semoga Alloh menjaga bapak dan keluarga selalu dalam kebaikan.

3. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N, M.P.A, selaku dosen Pembimbing Akademik sekaligus sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Semoga bapak dan keluarga sehat dan selalu dalam lindunganNYA.
4. Ibu Selvi Diana Meilinda, S.A.N, M.P.A, selaku dosen pembimbing kedua. Ibu yang sangat baik terimakasih banyak motivasi, bimbingan, dukungan, semangat, ilmu, waktu, tenaga, arahan, serta nasehatnya selama ini. Ibu tetap seperti ini ya, semoga Alloh menjaga ibu dan keluarga dimanapun dan kapanpun. Kebaikan ibu pasti terbalas dengan sempurna. Ibu yang baik, sehat terus ya. Semoga suatu saat bisa silaturrahmi kerumah lagi.
5. Bapak Syamsul Ma'arif, S.Sos, M.Si, selaku dosen pembahas. Terimakasih atas setiap saran, kritik dan masukan yang membangun selama ini pak. Semoga bapak dan keluarga selalu dirahmati Alloh.
6. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Bapak Dr.Bambang Utoyo, Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.A.P., Ibu Dewie Brima Atika, S.I.P, M.Si., Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si., Ibu Dr.Novita Tresiana, Bapak Dr.Noverman Duadji, Bapak Nana Mulyana, S.I.P., M.Si., Ibu Meiliyana, S.I.P., M.A., Ibu Devi Yulianti, S.A.N., M.A., Ibu Dra.Dian Kagungan, M.H., Ibu Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D., Bapak Izzul Fatchu Reza, S.A.N., M.P.A. terimakasih banyak atas setiap ilmu yang diajarkan kepada penulis.

7. Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terimakasih telah membantu setiap urusan administrasi yang dibutuhkan penulis selama ini.
8. Bapak dan Ibu guru MINU Sumber Mulyo, Bapak Ibu guru MtsI Sumber Mulyo, Bapak Ibu guru SMA Muhammadiyah 2 Karang Tengah, Bapak Ibu guru TK/TPA Nurul Hidayah, dan murobbi ku selama di Unila. Terimakasih atas ilmu-ilmu akademik dan spiritual yang kalian berikan telah menjelma dalam diri yang seperti ini. Maaf jika penulis jarang bersilaturrahmi, inshaa alloh doaku akan tetap terkirim dari jarak ini. Semoga Alloh SWT memuliakan kalian di surga.
9. Bapak Sukatmoko, Bapak Yusrona, Bapak Mufli, Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas dan seluruh staf yang sudah sangat baik membantu peneliti. Terimakasih keramahan dan kecekatan kalian. Semoga sehat selalu.
10. Bapak Sukriyono, Kepala Desa Labuhan Ratu 9. Terimakasih atas kesempatan mengenal bapak. Tetap bersahaja dan murah senyum, Alloh meridhoi anda.
11. Bapak Sumadi Hasmaran, manajer SRS beserta seluruh staf. Terimakasih telah membantu memberikan informasi untuk penelitian ini. Semoga SRS akan menjadi lebih baik lagi. Semoga badak-badak sumatera yang ada dipenangkaran dan dihutan bebas dapat terus berkembangbiak dengan baik, dan semakin banyak yang menyadari pentingnya keberadaan badak sumatera.
12. Mbak Nuke Arincy, mewakili YABI memberikan informasi yang mendukung penelitian ini. Semoga YABI mampu menjadi Ornop yang akuntabel.
13. Kakak pertama atas dukungannya. Semoga mbak dan keluarga selalu dalam lindunganNYA, sehat terus dan barokah pekerjaannya.

14. Kakak kedua atas segala hal yang tak dapat terdeskripsikan. Terimakasih telah menjadi kakak sekaligus sahabat. Semoga yang disemogakan segera tersemogakan. Mbak sangat baik, terlalu baik, sampai aku bingung mampukah aku melakukan hal sama denganmu? Semoga Alloh merahmatimu mbak.
15. Bungsu ku, dek Zen. Meski bungsu, kamu lelaki satu-satunya dalam keluarga ini. Ambil peranmu dek, ambil juga hakmu. Semangat raih cita-citamu, percayalah kami selalu ada untuk mendukung dan mendoakanmu. Asal kamu tetap berusaha dan berdoa, kamu akan mampu sampai pada titik itu, buat kami bangga dek. Kamu tetap adik kecil mbak dengan rambut belah pinggir, pipi gembul tumpah-tumpah dan dasi kupu-kupu (seragam TK) sampai kapanpun (meskipun kini badanmu lebih besar dari mbak *oops).
16. Keluarga besar mbah Yusuf dan mbah Sukiman yang telah menjadi tempatku tumbuh dan berkembang.
17. Keluarga kosan, bunda dan bati. Terimakasih telah sangat baik dan menerimaku selayaknya anak. Adik fitriyani, inget pesen bulek, kurangi kebiasaan mengunci diri didalam kamar. Semoga cita-cita jadi ibu persit terkabul (jadi istri pak ustadz juga baik kok, hehe). Mbak Sumarni, teman sekamar yang super introvert. Terimakasih telah mengajariku ilmu memahami pendiam sepertimu, maaf jika aku terlalu aktif. Kita memang bertolak belakang. Yulia Astri Andari, pemilik kamar tengah yang sudah lebih dulu jadi S.Sos. Semoga sehat terus dan sukses yaa, terimakasih selama ini telah begitu bersahaja. Yuni yang mengajarkan banyak tentang sabar.
18. Sahabat-sahabat wanita tersayangku: Uki Setiani si jomblo yang gak bisa moveon dari cemcemannya. Tetap begitu ya ki, suara keras bak TOA dan suka

membantu. Kalo gak suka atau bete ngomong ki, ekspresikan, tolak apa yang gak kamu suka dan kamu nilai gak sesuai. Jangan diem aja, mungkin kamu akan baik-baik saja setelah beberapa saat, tapi orang akan latah memerintahmu. Ambil hidayahmu ki, belum terlambat. Terimakasih ki, sudah mengajariku semangat dan kerja keras. Septiya Andri Astuti, si pemilik sifat keibuan. Terimakasih sering kali mengalah, hehe. Banyak belajar darimu. Bingung mau deskripsiin mengalahmu sep, terlalu banyak. Kamu kalo lagi bete serem sep, hehe. Tetap jadi orang baik ya. Ghina Ulfaridha, manusia paling gak bisa marah. Marah itu perlu ghin, ekspresiin aja, biar gak jadi penyakit. Tapi gak laju jadi pemarah ya, hehe. Kamu baik ghin, terlalu baik. Bukan gak pernah sakit hati, tapi selalu saja kamu anggap "yasudahlah". Terimakasih ghin, telah mengajariku lapang dada. Fans berat ayam, dasar. Banyakin makan sayuran ghin, biar seimbang sehatnya. Okke Wijayanti, yang suka blak-blakan ngomongin orang. Terimakasih punya teman kayak kamu jadi belajar untuk terus intropeksi diri. Ambil hidayahmu kke. Kamu tau hidayahmu datang, tapi kamu ragu. Ambil lah, sebelum terlambat. Yulia Artha Maria Maghdalena Simanjuntak, manusia yang gak enakan mau minta tolong, zzz. Ta, mandiri itu memang perlu, tapi bersama itu juga baik. Jangan selalu berfikir orang lain juga sibuk, cobalah untuk meminta bantuan jika memang perlu. Jangan memaksa diri. Terimakasih telah banyak mengajari tentang menjaga perasaan orang. Kamu orang baik ta, semoga Alloh melindungimu. Kesy Elisabeth, si gupek sekaligus perfectionist. Coba lebih santai kes, yakin aja kalo usaha lo akan berbanding lurus dengan hasilnya. Terimakasih kesy, sudah mengajari pentingnya mengusahakan kesempurnaan dari pekerjaan. Defita Selviani,

manusia paling kecil. Sukanya ngerjain tugas dadakan sampe begadang gak tidur berhari-hari. Lo bilang itu naluri, kalo gak mepet gak lancar mikirnya. Itu habit def, coba untuk perlahan rubah kebiasaan buruknya ye. Kurangin nge-vlog nya. Terimakasih sudah mengajarkan pentingnya kejar target dibawah tekanan dari kebiasaan begadangmu. Aku sayang kalian karena Alloh, meski kita berbeda keyakinan. Aku percaya Tuhan kita mengajarkan hal yang sama, kasih dan sayang. Semoga kalian selalu berada dalam lindunganNYA, semoga suatu saat ada waktu untuk sekedar bertemu dan nostalgia mengingat masa 4 tahun ini, dan semoga kita semua sukses. Aamiin

19. Teman-teman Alasmenara: Sidik (maaf sering gua marahin), Pindo (ketua angkatan yang mengaku gak bisa ngalahin gua, maaf sering gua singutin), Leo (manusia berponi abadi), Dinda (yang sudah tidak bisa kupercaya, suka bohong si), Dimas (manusia berbadan besar yang selalu ngingetin sama adek gua, tapi dia baik), Hafiz (yang baik dan cekatan gak pikir panjang nolongin orang), Adi (gua akan selalu inget lo jatohin horden di RS Urip pas gua sakit), Zulham (si gigi caling bermata beler), Ari (si lampung kentel), Ayu W (yang mau banget S2), Dila (si latah, teman KKN), Hendro (sang musisi, teman KKN), Dwi (sang pejuang yang hebat, sehat terus wi), Eka (gadis hitam yang suka nge-laut), Laras (si makhluk kecil yang sebenarnya tua), Ratu (si introvert nan sopan), Riska (punya cerita mistis yang terkenang), Sasa (yang belum lama ini bercerita susahnya cari duit), Luse (si penyuka doraemon), Arinta (yang baik dan pendiam), Desti (manusia tinggi dan murah senyum), Rindu (yang suka wifi an), Pepah (teman wifi an Rindu), Zikri (pacar meilika), Meilika (pacar Zikri), Ade (masih tomboy gak de?), Agnes (tailalat mempesona dibawah

hidung dan diatas bibir tepat ditengah), Fajar (si tinggi nan tegap), Andan (anak pesisir barat), Anggi (bujang jawa yang sopan), Asti (si gadis kuantitatif), Ayu Krui (mantan Ketum UKMBS), Cici (si model cantik), Eci (inget gak ci pas maba lo pinsan di gedung D dan gua ngaku teman lo, padahal belum kenal dekat. Giliran ditanya rumah lo gua gak tau, kunci hp lo gua gak tau, haha), Emon (suara khasmu akan kukenang mon), Devi P (yang sering dipanggil decil), Devi Y (rambutnya yang selalu panjang), Nuris (si menel), Ellyza (yang sempat hilang kemudian come back), Elva (si cantik dari Lambar), Fella (si hitam manis), Ghozie (si gendut yang datar tapi lucu), Isti (si anak metro), Hendriyansyah (si aneh), Kartika F (si kecil yang cantik), Lela (gadis manis yang kuat), Hasby (yang suka digoda ghina), Iqbal (si polos yang pernah bohongin gua), Nanda (peneliti YLKI), Nisa (si cantik berhidung mungil), Nita (gadis tinggi peneliti laut), Oca (yang nikah duluan), Yoga (budak Prabumulih), Yogi (bli Pesawaran), Galih (si hitam jawa medok), Resghi (si pelukis keren), Respaty (si pendiam yang gua gak pernah ngobrol sama dia), Revardo (rambut tebal yang suka terbang kalo jalan), Rico (si batak berkacamata), Syntia (berwajah kecil), taufiq (lelaki kuantitatif), Tiara (si puitis), Tulva (si cantik berambut tipis), Vania (anak Medan yang jarang pulang), Wahyu (yang suka ilang), Wiza (gadis padang), Wulan (terlihat kalem), Arif (pacar defita), BJ Shedy (yang susah percaya sama orang), Dewi A (si cemas), Fitri W (gadis padang yang suka buru-buru), Hendriko (perjaka mesuji), Jita (si gadis Martapura), Maya (si cantik yang neneknya di BK 9), Meylani (yang marganya sama dengan Pak Simon), Okta (dari musisi jadi pengendara sepatu roda), Pepy (dulu pernah tetanggaan kosan), Rahma (si

gadis batak yang gak kayak orang batak), Rijkiana (si fotografer cantik), Sarah (penyuka Sekala bumbum), Kartika R (si gendut yang cantik). Teman-teman yang diberi jalan berbeda: Edo (pak polisi), Mala (si solihah dari negeri Jiran), Bayu (yang sudah punya anak), Khaidir (bujang jawa yang selalu jenaka), Gibran (si gagah IPDN), Silvi (yang gak ada kabar), Panji (si mungil STAN).

20. Keluarga besar HIMAGARA, terimakasih banyak Aduselon, Anti Mapia, Ampera, Gelas Antik Atlantik, dan Alaska yang telah membersamai dan mengajarkan banyak hal kepada penulis selama kuliah di FISIP Unila. Terimakasih abang-abang dan mbak-mbak dari angkatan lain, telah meninggalkan jejak yang dapat dijadikan pelajaran bagi penulis.
21. Semua pihak yang membantu secara langsung atau tidak langsung selama penulis kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.

Skripsi ini ditulis dengan usaha yang maksimal sesuai dengan kemampuan peneliti. Jika masih terdapat banyak kekurangan, dapat dijadikan evaluasi atau penelitian lanjutan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang memerlukan.

Bandar Lampung, 1 Agustus 2017

Penulis

Uun Nuraini

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR SINGKATAN v

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Masalah 10
D. Manfaat penelitian 10

II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Tentang Akuntabilitas 11
1. Pengertian Akuntabilitas 11
2. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas 13
3. Jenis-Jenis Akuntabilitas 14
4. Kendala-Kendala Akuntabilitas 17
5. Faktor-Faktor Keberhasilan Akuntabilitas 19
B. Tinjauan Tentang Organisasi Non Pemerintah 21
1. Peralihan Istilah Ornop ke LSM 21
2. Pengertian Ornop/ LSM 24
3. Ciri-Ciri LSM 25
4. Jenis-Jenis LSM 27
5. Peran LSM 30
C. Tinjauan Tentang Akuntabilitas Ornop/LSM 33
1. Sejarah Ringkas Akuntabilitas Ornop/LSM 33
2. Definisi Akuntabilitas Ornop/LSM 37
3. Transparansi dan Akuntabilitas Ornop 38
4. Hubungan Antara Ornop dengan Pemerintah, Lembaga Donor, dan Swasta 45
D. Kerangka Pikir 49

III. METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 52
B. Fokus Penelitian 53
C. Lokasi Penelitian 55
D. Sumber Data 56
E. Teknik Pengumpulan Data 56
F. Teknik Analisis Data 61
G. Teknik Keabsahan Data 62

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Terbentuknya YABI 65
B. Visi *Sumatran Rhino Sumatera* 67
C. Misi *Sumatran Rhino Sumatera* 67
D. Penangkaran dan Pengembangbiakkan (SRS) 68
E. Struktur Kepengurusan *Sumatran Rhino Sumatera* 69
F. Ruang Lingkup Kegiatan *Sumatran Rhino Sumatera* 73
G. Kegiatan yang Penah dan Sedang Dilakukan 73
H. Kerjasama dengan Lembaga atau Instansi Lain 76

V. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kepemimpinan yang Berkemampuan 80
B. Sistem Koordinasi Internal yang Baik 87
C. Komunikasi yang Baik dengan Mitra 92
D. Standar Kegiatan dan Pembagian Tugas yang Jelas 98
E. Evaluasi dan Pertanggungjawaban 103
F. Menjaga Relasi dengan Publik 117
G. Menjaga Kepercayaan Donor 127

VI. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan 140
B. Saran 140

DAFTAR PUSTAKA 143

LAMPIRAN 146

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1 Daftar Informan.....57
2 Hasil Observasi Penelitian 58
3 Daftar Dokumen yang Didapatkan.....60

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1 Kerangka Pikir 51
2 Struktur Kordinasi Organisasi.....72

DAFTAR SINGKATAN

IUCN	: *International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources*
KLHK	: Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Ornop	: Organisasi Non Pemerintah
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
TNWK	: Taman Nasional Way Kambas
BTNWK	: Balai Taman Nasional Way Kambas
TNBBS	: Taman Nasional Bukit Barisan Selatan
TNGL	: Taman Nasional Gunung Leuser
TNKS	: Taman Nasional Kerinci Seblat
SRS	: *Sumatran Rhino Sanctuary*
YSRS	: Yayasan *Sumatran Rhino Sanctuary*
YABI	: Yayasan Badak Indonesia
IRF	: *International Rhino Foundation*
YMR	: Yayasan Mitra Rhino
Ditjen PHKA	: Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
BII	: Bank Internasional Indonesia
ARSG	: *Asian Rhino Specialist Group*
UNDP	: *United Nations Development Program*
TSI	: Taman Safari Indonesia
TFCA	: *Tropical Forest Conservation Action*
NGO	: *Non Government Organization*
LSD	: Lembaga Sosial Desa

PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa
UU : Undang-Undang
Ormas : Organisasi Kemasyarakatan
Orba : Orde Baru
Inmendagri : Instruksi Menteri Dalam Negeri
Kabag : Kepala Bagian
Humas : Hubungan Masyarakat
Infokom : Informasi dan Komunikasi
SOP : Standar Operasional Prosedur
RKT : Rencana Kerja Tahunan
LPJ : Laporan Pertanggungjawaban
PKS : Perjanjian Kerjasama
RO : Rencana Operasional
MoU : *Memorandum of Understanding*
UPT : Unit Pelaksana Teknis
PHPA : Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam
PKBI : Program Konservasi Badak Indonesia
RPU : *Rhinos Protection Unit*
WWf : *World Wide Fund for Nature*
FKH IPB : Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor
BPPV : Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner
Balitnak : Balai Penelitian Ternak
Balitvet : Balai Penelitian Veteriner
WCS : *Wildlife Conservation Society*
Allert : Aliansi Lestari Rimba Terpadu
PKHS : Penyelamatan dan Konservasi Harimau Sumatera
Polhut : Polisi Hutan
HT : *Handy Talky*
SIMAKSI : Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi
SPT : Surat Perintah Tugas
Jobdes : *Job Description*
DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

NTF : *National Tropical Fruit*

PLG : Pusat Latihan Gajah

PKG : Pusat Konservasi Gajah

CSR : *Corporate Social Responsibility*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi, isu lingkungan menjadi sangat krusial. Lingkungan hidup di muka bumi yang menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya semua jenis makhluk hidup telah menjadi sorotan publik karena kondisinya saat ini yang membutuhkan perhatian lebih dari manusia. Manusia sebagai makhluk berakal telah menyumbang banyak penyebab kerusakan dan bahkan kepunahan berbagai jenis makhluk hidup di muka bumi. Lahan tempat tinggal, makanan, pakaian, bahan bakar, dan barang-barang yang menunjang kehidupan manusia lainnya telah memberikan dampak seperti kerusakan habitat hutan, konflik manusia dengan satwa, perdagangan, perburuan dan penangkapan berlebihan, perubahan iklim yang tidak stabil dan populasi yang mencemari lingkungan. (Sumber: http://www.wwf.or.id/program/spesies/ diakses pada 05 Januari 2017 pukul 09.37 WIB)

Habitat yang semakin rusak dan minimnya pengetahuan tentang keanekaragaman hayati akan memperparah kepunahan. Populasi manusia yang semakin bertambah bahkan dua kali lipat dalam kurun waktu 35 tahun telah menyebabkan 45 persen spesies hewan tidak bertulang belakang seperti

kumbang, kupu-kupu, laba-laba, dan cacing mengalami penurunan jumlah. Hasil penelitian mengungkap bahwa 41 persen amfibi akan segera menghilang, seperempat dari spesies mamalia dan 13 persen jenis burung akan hilang. (Sumber: http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/12/benarkah-manusia-penyebab-kepunahan-hewan diakses pada 05 Januari 2017 pukul 10.20 WIB)

Kelestarian ekosistem saat ini menjadi salah satu isu sentral mengenai fungsi lingkungan hidup karena semakin kritisnya keadaan keseimbangan alam. Pelestarian flora dan fauna menjadi prioritas beberapa dekade ini karena ditemukannya fakta bahwa terdapat beberapa jenis flora dan fauna yang terancam punah dan bahkan sudah dinyatakan punah. *International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN) tahun 2011 merilis data fauna asli Indonesia yang teancam punah adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, 32 jenis amfibi. Pada tahun 2013, IUCN kembali merilis data fauna yang berada pada status keterancaman tertinggi/ *critically endangered* (kritis) berjumlah 69 hewan, 197 spesies berstatus *endangered* (terancam) dan 539 spesies berstatus *vulnerable* (rentan). (Sumber: https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.WG27xVOLTIU diakses 05 Januari 2017 pukul 10.28 WIB)

Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah yang berwenang secara formal menjaga dan melindungi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada faktanya tidak mampu melaksanakan perannya sendiri. Atas kesadaran ini, pemerintah secara formal untuk pertama kalinya menetapkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan

Hidup bahwa tugas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah tugas pemerintah dan masyarakat, kemudian disebutkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pemerintah melakukan perannya melalui regulasi formal dengan membuat peraturan-peraturan perlindungan lingkungan hidup dan ekosistemnya. Selain itu, pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tentu saja telah membentuk tim kerja seperti Unit Pelaksana Teknis berupa Balai Taman Nasional yang tersebar dibeberapa daerah di Indonesia untuk melakukan perlindungan hutan dan lingkungan dari perilaku tidak bertanggungjawab yang dapat merusak ekosistem flora dan fauna. Namun, permasalahan kerusakan lingkungan yang sangat kompleks dan sebagian besar disebabkan oleh sikap tidak bertanggungjawab manusia di sekitar lingkungan konservasi itu sendiri menjadi hambatan yang serius. Permasalahan yang berlarut ini memunculkan kesadaran dari masyarakat yang kemudian bergabung dalam sebuah komunitas atau kelompok yang bergerak dalam perlindungan hutan dan lingkungan.

Kelompok masyarakat tersebut disebut sebagai Organisasi Non Pemerintah (Ornop)/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Atas kemampuan pergerakan yang lebih dekat kepada masyarakat akar rumput, LSM/ Ornop semakin banyak bermunculan dengan berbagai latar belakang pergerakan. Salah satunya adalah Yayasan *Sumatran Rhino Sancturay*, yaitu sebuah organisasi yang sejak tahun 1997 berfokus pada konservasi badak sumatera dan merupakan suaka

pertama di Indonesia yang dibangun untuk menangani penangkaran badak sumatera yang sudah dinyatakan sebagai salah satu hewan yang terancam punah.

Badak dengan nama latin *Dicerorhinus Sumatrensis* ini diperkiran populasinya hanya tinggal 100 individu saja dengan sebaran tiga bentang alam yakni Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), dan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Populasinya di TNWK diperkirakan 27-30 individu dan di TNBBS ada sekitar 48-50 individu (YABI, 2011). (Sumber: www.wbh.or.id/index.php?option=com_conten&view=article&id=253:menjadi-penerus-kelestarian-badaksumatera&catid=42:media-lain &itemid=18 diakses pada 25 September 2016 pukul 08.23 WIB)

Pusat konservasi SRS adalah suaka pertama yang dibangun di Indonesia sesuai dengan rekomendasi lokakarya Pengembangan Suaka Badak Sumatera tahun 1994 di Safari Garden Hotel, Cisarua, Bogor. SRS mulai dibangun didalam kawasan TNWK pada tahun 1996 berdasarkan hasil penyeleksian terhadap beberapa kawasan potensial sebagai pusat pengembangbiakan badak sumatera, diantaranya adalah TNBBS Sukaraja, Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Bangko-Jambi, TNKS Air Seblat, TNGL Sungai Lepan dan TNWK Lampung.

Alasan sosial dibentuknya Yayasan SRS dalam menangani konservasi hewan langka badak sumatera adalah karena sulitnya menjaga kehidupan badak yang soliter dan perkemabangbiakan yang sulit, sehingga dibutuhkan pengurusan dan penjagaan yang profesional dan terfokus untuk dapat menjaga populasi dan mengusahakan perkembangbiakan badak sumatera. Seperti yang dikutip oleh

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur bahwa badak memiliki keistimewaan, yaitu pemakan semak dan pucuk dedauan. Jasanya penting untuk memelihara kualitas hutan. Saat pucuk daun atau ranting muda dimakan, maka pucuk baru yang tumbuh tersebut akan menyerap karbon dioksida lebih banyak jumlahnya daripada pucuk daun yang tua. Berdasarkan penelitian Strein pada tahun 1974, badak sumatera memakan 108 spesies tumbuhan dari 44 famili. Detailnya 82 spesies daun, 17 spesies buah, 7 spesies kulit kayu, dan 2 spesies bunga. (Sumber: http://bbksdajatim.org/fakta-menarik-mengapa-kehidupan-badak-harus-kita-jaga.php diakses pada 9 April 2017 pukul 17.14 WIB). Keistimewaan badak sumatera dengan jenis makanan dan pola makan yang dalam satu hari memakan kurang lebih 7 sampai 10 Kg makanan secara langsung dan tidak langsung telah membantu mengurangi pemanasan global.

Ornop YSRS saat ini sudah melebur menjadi YABI dengan Ornop lainnya yaitu Yayasan Mitra Rhino yang juga melaksanakan berbagai kegiatan pelestarian badak sejak tahun 1990. Kedua Ornop tersebut membubarkan diri dan melebur kedalam YABI pada tahun 2007, yaitu 11 tahun setelah YSRS berdiri sendiri dan melakukan kegiatan konservasi badak sumatera. Berada dibawah payung hukum YABI, YSRS dan YMR tidak banyak berubah dalam hal tujuan dan kegiatan. YABI sebagai peleburan dua Ornop melanjutkan dan memperbaharui kegiatan dan program yang selama ini sudah dan sedang dilaksanakan oleh YSRS dan YMR. Sampai dengan saat ini, justru yang terlihat adalah prestasi dan sejarah baru dalam konservasi dan pelestarian badak. Prestasi besar yang diraih oleh YABI adalah kepercayaan besar yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia dan mitra dari kebun binatang diluar

negeri kepada SRS untuk melakukan kegiatan konservasi badak sumatera, seperti Kebun Binatang Ragunan dan *Howletts and Lympne Zoo*, Inggris.

Selain itu, pengembalian dua anak badak sumatera yang terjadi pada tahun 2007 dan 2015 dan sampai saat ini tinggal di SRS merupakan bentuk peningkatan kepercayaan atas kapabilitas SRS dalam melakukan konservasi badak sumatera. Badak sumatera pertama, "Andalas", dikembalikan ke Indonesia dengan tujuan untuk mengembangbiakkan badak dengan *breading* antar badak yang normal dan sehat, hal ini karena sebelum kedatangan badak pertama dari *Los Angeles Zoo*, Amerika Serikat, SRS hanya memiliki 1 badak jantan yang kurang sehat secara reproduksi. Selain dipercayakannya badak Andalas kepada SRS, kemudian pada tahun 2016 badak kedua yaitu Harapan dikembalikan dari *Cincinnati Zoo*, Amerika Serikat, dengan alasan untuk menghindari penularan penyakit *hemacrhomatosis* yang telah menyerang dan menyebabkan kematian pada induk dan saudari badak Harapan. (Sumber: http://badak.or.id/pengembalian-badak-sumatera-harapan-dari-cincinnati-zoo-ke-suaka-rhino-sumatera-srs-taman-nasional-way-kambas/ diakses pada 09 Mei 2017 pukul 10.03 WIB)

Keberhasilan SRS lainnya adalah kelahiran anak badak bernama "Andatu" pada tahun 2012 yang merupakan anak badak pertama yang lahi di penangkaran setelah 124 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan kelahiran anak badak kedua bernama "Delilah" pada tahun 2016. Kelahiran dua anak badak tersebut telah menunjukkan bahwa SRS telah berhasil menemukan perilaku kawin badak sumatera dan membuktikan mampu mengembangbiakkannya, berhasil menemukan siklus reproduksi individu badak sumatera, berhasil

menemukan waktu efektif untuk mempertemukan dan breading, serta SRS telah mencatat sejarah penting bagi dunia konservasi badak. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015 bahkan telah menetapkannya sebagai pusat konservasi badak sumatera (Buku Profil YABI Tahun 2016).

Sampai dengan saat ini, YABI telah menorehkan banyak prestasi atas usaha-usaha yang telah dilakukan baik sebelum atau sesudah YABI diresmikan sebagai Ornop peleburan dari YMR dan YSRS. Kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan oleh YMR dan YSRS tetap dilakukan dan prestasi-prestasi yang pernah didapatkan tetap diingat sebagai sebuah keberhasilan telak dalam upaya perlindungan dan konservasi badak sumatera. Dalam berkegiatan sehingga mencapai prestasi membanggakan sampai dengan saat ini tentu saja membutuhkan dukungan dari banyak pihak berupa moral dan finansial, YSRS dan YMR sebelum dan sesudah melebur menjadi YABI sudah menjalin kerjasama tersebut diantaranya kerjasama dengan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Dirjen PHKA), Bank Internasional Indonesia (BII), *International Rhino Foundation* (IRF), *Asian Rhino Specialist Group* (ARSG), MAKIN Group, *United Nations Development Program* (UNDP), Taman Safari Indonesia, *Tropical Forest Conservation Action for Sumatera* (TFCA Sumatera), dan *Save Our Species* IUCN. (Buku Profil YABI, 2016)

Prestasi yang telah dicapai serta bertahannya donor sampai saat ini merupakan keberhasilan yang membanggakan bagi YABI sebagai Ornop. Namun,

keberhasilan yang dibanggakan tersebut masih belum maksimal untuk menjadikan YABI sebagai Ornop yang akuntabel. Hal ini karena dalam menjalankan programnya selama ini, SRS khususnya, tidak pernah melakukan upaya pemberdayaan kepada masyarakat. Seluruh kegiatannya difokuskan kepada kesehatan dan kebutuhan badak sumatera (Dokumen Program Kerja SRS Tahun 2015). Selain itu, informasi tentang SRS terbilang tertutup. Web resmi milik YABI hanya berisi tentang prestasi dan keberhasilan yang telah diraih selama ini. Tidak ada program kerja atau hasil kegiatan yang dapat diakses dengan mudah serta menambah pengetahuan.

Menarik untuk kemudian meneliti pencapaian keberhasilan akuntabilitas SRS sebagai bagian dai YABI. Organisasi non pemerintah atau yang lebih disebut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia adalah organisasi yang merepresentasikan kepentingan masyarakat. LSM/Ornop dianggap sebagai inti dari masyarakat sipil yang aktif, yang mendorong pemberian pelayanan publik dan mendukung terpenuhinya hak-hak masyarakat terhadap negara. (Jordan dan Lisa, 2009: 3), ketika LSM/Ornop atas nama rakyat semakin berani memberikan suara dan pendapat serta kritikan terhadap setiap permasalahan publik, diberi ruang dan diakui keberadaan serta kritik dan sarannya, maka tuntutan agar LSM/Ornop bersikap akuntabel semakin besar.

Akuntabilitas dan transparansi menjadi bagian terpenting dari sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Tuntutan demokrasi dengan cepat menyebar keseluruh lini kehidupan masyarakat, tidak terkecuali terhadap organisasi kemasyarakatan. Jordan dan Lisa (2009:4) menjelaskan bahwa

persoalan akuntabilitas LSM sudah mengemuka karena tiga alasan, yaitu: adanya pertumbuhan yang cepat dalam hal jumlah dan ukuran LSM, mengalirnya dana yang lebih besar, dan suara yang lebih lantang dalam mempengaruhi kebijakan publik.

Sedarmayanti (2013:270) mengutip dari *World Conference on Governance* UNDP tahun 1999, dikatakan bahwa *good governance* dilaksanakan dengan menganut asas: keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas menjadi bagian paling penting dalam menjalankan sebuah organisasi sebagai tolak ukur kepercayaan publik. Akuntabilitas tidak hanya penting untuk lembaga pemerintah, tetapi juga untuk organisasi publik non pemerintah dan bahkan swasta.

Berdasarkan pemaparan tentang berbagai pencapaian, prestasi dan peran penting yang diperoleh oleh YSRS dan YMR baik sebelum dan sesudah melebur menjadi YABI, menarik untuk diteliti tentang keberhasilan akuntabilitas bagi program SRS. Alasan penelitian difokuskan kepada SRS adalah karena SRS telah sejak lama berdiri bahkan sebelum YABI dibentuk dengan berbagai kegiatan konservasi badak sumatera. Selain itu, SRS adalah simbol keberhasilan bagi YABI saat ini dalam upaya konservsi badak sumatera yang telah ditetapkan sebagai pusat konservasi badak sumatera satu-satunya di Indonesia dan bahkan di dunia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana keberhasilan akuntabilitas Organisasi Non Pemerintah YABI pada program SRS?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis keberhasilan akuntabilitas Organisasi Non Pemerintah YABI yang difokuskan pada program SRS.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dalam kajian Ilmu Administrasi Publik khususnya mengenai pentingnya akuntabilitas bagi organisasi non pemerintah.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi pemerintah (Kemendagri melalui Departemen Kesbangpol) dan organisasi non pemerintah untuk dapat mempertimbangkan pentingnya membuat aturan hukum yang jelas dan rinci tentang standar akuntabilitas organisasi non pemerintah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Sedarmayanti (2013:105) mengatakan bahwa secara absolut akuntabilitas memvisualisasikan ketaatan kepada peraturan dan prosedur yang berlaku, kemampuan untuk melakukan evaluasi kinerja, keterbukaan dalam pembuatan keputusan, mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan dan menerapkan efisiensi dan efektivitas biaya pelaksanaan tugas-tugasnya. Pengendalian sebagai bagian penting manajemen yang baik, adalah saling menunjang dengan akuntabilitas.

Menurut Ghartey dalam Sedarmayanti (2013:105), akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik.

Jordan dan Peter (2009:14) mengatakan bahwa akuntabilitas paling tidak mengacu kepada suatu keterikatan antara tindakan dan tujuan yang sudah didefinisikan dan disetujui. Akuntabilitas adalah sebuah konsep normatif yang

terbentuk oleh masyarakat dan selalu terkait dengan interpretasi atas fakta-fakta, lingkungan, tindakan, atau sikap tertentu.

Menurut *The Oxford Advance Learner's Dictionary* dalam Sedarmayanti (2013:104), akuntabilitas adalah keharusan memberikan sebuah penjelasan atas kegiatan yang telah dilakukan. Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi atau atasannya.

Parker *and* Gould dalam jurnal Transformasi Nilai Budaya Lokal dalam Membangun Akuntabilitas Sektor Publik yang ditulis oleh Randa dan Fransiskus, mengatakan bahwa akuntabiltas merupakan komitmen dua pihak yaitu pihak pemberi dan penerima. Akuntabilitas juga berhubungan dengan konsep kejujuran dan etika.

Pemahaman tentang akuntabilitas juga disampaikan oleh Abidin dan Rukmini (2004:56) yang mengartikan akuntabilitas sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Melengkapi pendapat Abidin dan Rukmini, Santosa (2012:50) mengatakan bahwa akuntabilitas berkaitan dengan hubungan formal.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang jelas dan transparan secara formal dan moral atas

kinerja seseorang atau badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban kinerja tersebut.

2. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Menurut Sedarmayanti (2013:108), prinsip-prinsip dalam menjalankan akuntabilitas adalah sebagai berikut:

a. Harus ada komitmen pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan mimpi agar akuntabel;
b. Harus merupakan sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Harus menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
d. Harus berorientasi pencapaian visi misi dan hasil serta manfaat yang diperoleh;
e. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Fachra dalam Abidin dan Rukmini (2004:75) mengatakan bahwa ada beberapa prinsip umum transparansi dan akuntabilitas yang dapat dilakukan, yaitu:

a. Adanya catatan finansial dan kegiatan yang cukup rinci beserta bukti-bukti memadai sebagai bahan laporan;
b. Adanya tim pemeriksa independen yang mempunyai akses cukup untuk memeriksa keuangan dan manajemen operasional Ornop;

c. Adanya *public disclosure*, laporan-laporan yang dibuat berdasarkan catatan-catatan diatas dibuka untuk kalangan internal dan eksternal. Laporan ini harus dimuat di koran harian atau media lain yang dapat diakses masyarakat luas. Bagi Ornop yang konstituennya terbatas, cukup dengan memuat laporan, baik keuangan maupun kegiatan terbitan buletin atau media internal yang ada dan kemudian disebarkan pada konstituen.

3. Jenis-Jenis Akuntabilitas

Menurut Sedarmayanti (2013:105), akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam lingkungan yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Waluyo (2007:178) mengatakan bahwa akuntabilitas sebagai unsur utama *good governance* tercermin dari beberapa kategori akuntabilitas sebagai berikut:

a. Akuntabilitas Internal

Akuntabilitas internal merupakan pertanggungjawaban seseorang kepada Tuhannya. Tanggungjawab ini merupakan tanggungjawab pribadi seseorang atas segala sesuatu yang telah dikerjakannya. Akuntabilitas internal disebut juga sebagai akuntabilitas spiritual, yang lebih tergantung pada moral dan kemampuan individu mengendalikan dirinya. Akuntabilitas ini sangat sulit diukur karena tidak ada ukuran yang jelas dan dapat diterima semua orang.

b. Akuntabilitas Eksternal

Akuntabilitas eksternal adalah pertanggungjawaban yang relatif mudah diukur karena standar prosedurnya dapat dikembangkan dengan jelas. Akuntabilitas eksternal mengandung pengertian kemampuan untuk

menjawab setiap pertanyaan yang berhubungan dengan capaian kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang.

Yango dalam Adisasmita (2011:79) mengatakan bahwa selain berdasarkan lingkungan sebuah organisasi atau instansi, akuntabilitas memiliki jenis-jenis yang lebih luas sebagai lanjutan dari fungsi eksternalnya. Berikut adalah empat jenis akuntabilitas yang perlu dicermati dengan baik oleh LSM:

a. *Regulatory Accountability*

   Akuntabilitas jenis ini merupakan akuntabilitas yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama peraturan keuangan dan peraturan pelaksanaan lainnya yang bersifat administratif.

b. *Managerial Accountability*

   Akuntabilitas manajerial didefinisikan sebagai pertanggungjawaban yang berhubungan dengan ruang lingkup pertanggungjawaban pengelola sesuai dengan peran yang dilakukannya dalam pemanfaatan semua sumber daya secara efektif dan efisien serta pelaksanaan proses manajerial suatu LSM.

c. *Program Accountability*

   Akuntabilitas program merupakan pertanggungjawaban dalam hal pencapaian akhir dalam suatu program kegiatan LSM.

d. *Process Accountability*

   Akuntabilitas jenis ini didefinisikan sebagai pertanggungjawaban yang menitikberatkan pada tingkat pencapaian kesejahteraan sosial atas pelaksanaan kebijakan dan aktivitas-aktivitas organisasi.

Paul dalam Adisasmita (2011:81) menambahkan bahwa dalam kerangka ketatanegaraan, keberadaan LSM dapat dihubungkan dengan akuntabilitas yang secara umum dapat dibedakan ke dalam tiga jenis akuntabilitas, yaitu:

a. *Democratic Accountability*

   Democratic accountability berkaitan dengan pertanggungjawaban LSM terhadap seluruh lapisan masyarakat yang kepentingannya difokuskan oleh LSM yang bersangkutan.

b. *Professional Accountability*

   Professional accountability berkaitan dengan pertanggungjawaban para profesional dalam melaksanakan tugas profesinya di LSM yang dilandasi dengan norma-norma dan etika profesi.

c. *Legal Accountability*

   Legal accountability merupakan pertanggungjawaban atas ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dalam setiap proses pelaksanaan fungsi LSM dalam mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa SRS yang menjadi objek studi kasus dalam penelitian ini lebih cocok diteliti dengan mengkategorikan SRS kedalam jenis akuntabilitas yang disampaikan oleh Yango dalam Adisasmita (2011:79), yaitu: *regulatory accountability, managerial accountability, program accountability, dan process accountability.* Pemilihan jenis akuntabilitas ini berdasarkan identitas SRS sebagai unit dari Ornop YABI yang profesional sehingga untuk mewujudkan

akuntabilitas organisasi harus dinilai melalui indikator yang disampaikan oleh Yango dalam Adisasmita (2011:79) tersebut.

4. Kendala-Kendala Akuntabilitas

Menurut Mahsun dalam Setiawan (2014:26-28), dalam mengimplementasikan akuntabilitas pada umumnya menemui kendala yang akan menciptakan kesehatan dan hubungan akuntabilitas tidak efektif. Beberapa hal yang menjadi kendala akuntabilitas yaitu:

a. Agenda atau Rencana yang Tidak Transparan

   Agenda atau rencana organisasi yang disusun secara tidak trasparan akan mengarahkan organisasi dalam suatu kondisi yang hanya menguntungkan perseorangan. Akuntabilitas mensyaratkan transparansi, dan transparansi berarti keterbukaan.

b. Favoritsm

   Favoritsm merupakan isu yang licik. Manajemen dapat saja melakukan kinerja yang lebih unggul dan meninggalkan karyawan yang lainnya. *Favoritsm* tidak mendukung inklusivitas dan kerja tim, hal ini bertolakbelakang dengan syarat terwujudnya akuntabilitas yang mengharuskan keberadaan kedua inklusivitas dan kerja tim.

c. Kepemimpinan yang Lemah

   Komitmen pemimpin untuk membangun suatu lingkungan yang memiliki akuntabilitas merupakan hal yang krusial. Tanpa kepemimpinan yang kuat, hasil kinerja akan kurang dari yang diharapkan.

d. Kekurangan Sumber Daya

Rencana organisasi akan menjadi kurang berguna jika dalam pelaksanaannya kekurangan sumber daya yang akan menjadi daya dukung terlaksananya rencana organisasi. Untuk memperoleh hasil yang baik atas kinerjanya, organisasi harus melakukan investasi pada karyawannya.

e. Lack of Follow-Through

Ketika manajemen mengatakan bahwa mereka akan mengerjakan sesuatu dan mereka tidak akan mengerjakan sesuatu, hal ini berarti manajemen mengatakan pada karyawan bahwa manajemen tidak dapat untuk menindaklanjuti.

f. Garis Wewenang dan Tanggungjawab Kurang Jelas

Garis wewenang dan tanggungjawab anggota organisasi yang jelas merupakan inti dari suatu bentuk hubungan akuntabilitas. Kejelasan garis wewenang dan tanggungjawab harus dipahami dan diterima oleh seluruh anggota organisasi, hal ini untuk memahami garis kordinasi yang jelas yang pada gilirannya akan menciptakan akuntabilitas kinerja organisasi.

g. Kesalahan Penggunaan Data

Informasi kinerja harus lengkap dan memiliki kredibilitas serta harus dilaporkan secara tepat waktu. Penggunaan data yang tidak menyeluruh akan mendatangkan pemahaman yang sangat mungkin berbeda dari yang dimaksudkan oleh pelapor kinerja tersebut.

Sedangkan menurut Suryono dalam Setiawan (2014:28-29) dampak dari akuntabilitas sebuah organisasi atau instansi adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat yang pada gilirannya akan mengakui dan mendambakan

keberadaan organisasi atau instansi tersebut tetap berada di dekat masyarakat. Dalam pelaksanaannya, terdapat hambatan-hambatan akuntabilitas, yaitu:

a. Tekanan dari lingkungan, faktor lingkungan sangat mempengaruhi kinerja organisasi pelayanan dalam transaksi dan interaksinya antara lingkungan dengan organisasi publik;
b. Budaya patrimonial, hal ini berkaitan dengan budaya organisasi penyelenggara pelayanan publik di Indonesia masih banyak terkait oleh tradisi politik dan budaya masyarakat setempat yang sering tidak kondusif dan melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

5. Faktor-Faktor Keberhasilan Akuntabilitas

Menurut Adisasmita (2011:87), untuk mencapai keberhasilan akuntabilitas perlu diperhatikan faktor-faktor berikut:

a. Kepemimpinan yang Berkemampuan

   Untuk menyelenggarakan akuntabilitas yang baik di instansi atau organisasi diperlukan pemimpin yang sensitif, responsif, dan akuntabel serta transparan kepada bawahannya maupun kepada masyarakat.

b. Debat Publik

   Sebelum kebijakan pokok/ besar/ penting disahkan seharusnya dilakukan debat publik terlebih dahulu untuk memperoleh masukan yang maksimal. Dengan demikian akan diketahui apa dan bagaimana indikator kinerja yang harus dicapai organisasi, masyarakat akan memberikan banyak masukan.

c. Koordinasi

Kordinasi yang baik di dalam organisasi atau instansi sangat diperlukan bagi tumbuh berkembangnya akuntabilitas.

d. Otonomi

Organisasi atau instansi dapat melaksanakan kebijakan menurut caranya sendiri yang dianggap paling efektif dan efisien bagi pencapaian tujuan organisasi. Otonomi yang dimaksud adalah pada pelaksanaan teknis. Otonomi tidak boleh mengurangi kordinasi dan keberhasilan tujuan pusat.

e. Diterima oleh Semua Pihak

Tujuan dan makna dari akuntabilitas harus dikomunikasikan secara terbuka kepada semua pihak sehingga standar dan aturannya dapat diterima oleh semua pihak.

f. Negosiasi

Harus dilakukan negosiasi publik mengenai perbedaan-perbedaan tujuan dan sasaran tanggungjawab dan kewenangan setiap organisasi atau instansi. Penentuan siapa yang bertanggungjawab atas suatu kegiatan dan siapa yang terkait dengan kegiatan tersebut perlu ditetapkan.

g. Perlu Pemahaman Masyarakat

Penerimaan masyarakat akan sesutau hal yang baru akan banyak dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap hal baru tersebut. Pelaksanaan akuntabilitas yang kemudian dikomunikasikan kepada masyarakat, sehingga akan dapat diperoleh ekspektasi dan bagaimana tanggapan mereka mengenai hal tersebut.

h. Adaptasi Secara Terus Menerus

Perubahan yang terjadi di masyarakat akan mengakibatkan perubahan dalam akuntabilitas. Sistem akuntabilitas harus secara terus menerus responsif terhadap setiap perubahan yang terjadi di masyarakat.

Koppel dalam Wicaksono pada jurnalnya yang berjudul Akuntabilitas Sektor Publik menjelaskan bahwa akuntabilitas memiliki sejumlah dimensi, di antaranya: transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, tanggung jawab, dan responsivitas.

B. Tinjauan Tentang Organisasi Non Pemerintah

1. Peralihan Istilah Ornop ke LSM

Konsep *civil society* dalam sejarahnya telah digunakan dalam pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Madinah dengan konsep *ummah* yang tertuang dalam Piagam Madinah. Konsep *ummah* yang identik dengan *civil society* mengalami perubahan istilah menjadi konsep masyarakat madani. Namun sebagai sebuah konsep, *civil society* lebih diakui berasal dari proses sejarah masyarakat barat yang dikenalkan pertama kali oleh Cicero (106-43 SM) dengan menggunakan kata "*societies civilis*" dalam filsafat politiknya dan Aristoteles (384-322 SM). Cicero mengidentikkan *society* dengan *the state* (negara), yaitu sebuah komunitas yang mendominasi sejumlah komunitas lain. Berbeda dengan Cicero, Aristoteles tidak menggunakan istilah *civil soceity*, tetapi *koininie politike*, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Pada pertengahan abad 18, terminologi ini mengalami pergeseran makna. Negara dan *civil society*

kemudian dimengerti sebagai dua buah entitas yang berbeda bersamaan dengan proses pembentukan sosial dan perubahan-perubahan struktur politik di Eropa sebagai akibat dari zaman *enlightment* dan modernisasi yang sangat berperan menggusur rezim-rezim absolut. (Sumber: http://staff.uny.ac.id/sites/ default/files/penelitian/dra-sri-agustin-sutrisnowati-msi/civilsociety-vita-2.doc diakses pada 09 Januari 2017 pukul 11.08 WIB)

Menurut Bastian (2007:8), *civil society organization* adalah organisasi masyarakat yang independen dan tidak menjadi bagian formal pemerintah sebagai perwujudan dan atau pewadahan budaya dan hak masyarakat. Jadi, masyarakat sipil dapat dikategorikan sebagai *popular organization* (organisasi massa/ rakyat), organisasi profesi (pers, dan lain-lain), *Non Government Organization* (NGO)/ LSM, serikat buruh, kamar dagang, asosiasi etnis, organisasi keagamaan, kelompok siswa, organisasi budaya, klub olahraga, dan organisasi akar rumput yang berbasis pada ruang tertentu. Keberadaan *civil society* kemudian menjadi tren di negara maju dan berkembang lainnya yang juga menerapkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan.

Negara Indonesia secara tidak langsung telah tertular konsep *civil society organization* sejak sebelum kemerdekaan, generasi pertamanya adalah lembaga keagamaan yang sifatnya sosial atau amal sebagai cikal bakal berkembangnya LSM di Indonesia. Pada tahun 1950-an tercatat muncul organisasi masyarakat yang kegiatannya bersifat alternatif terhadap program pemerintah, dua pelopornya yaitu Lembaga Sosial Desa (LSD) dan Perkumpulan Keluarga Kesejahteraan Sosial. Perkembangan LSM kemudian mengalami peningkatan dan perluasan perannya di berbagai sektor kenegaraan.

Saragih (1995:7-8) memberi pengertian umum dari istilah Ornop pada dasarnya sama dengan NGO yang berasal dari terminologi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Istilah LSM diusulkan oleh Dr. Sarino Mangunpranoto pada pertemuan Ornop yang bergerak di bidang pembangunan pedesaan di Ungaran tahun 1978. Alasan penggunaan istilah LSM di Indonesia adalah karena NGO merupakan istilah asing yang memberikan kesan anti pemerintah dan banyak kelompok bisa tergolong kedalamnya, sehingga digunakanlah istilah LSM.

Pergeseran penggunaan istilah Ornop menjadi LSM sebenarnya menimbulkan perbedaan arti, landasan Ornop adalah untuk "*non governmentalism*", sedangkan LSM adalah "*auto governmentalism*", dengan kata lain yang dibangun oleh LSM bukan "non kepemerintahan" tetapi keswadayaan dan kemandirian. Penggantian istilah Ornop menjadi LSM sesungguhnya telah memberikan perbedaan makna yang sangat mendasar. Formalisasi kemudian dilakukan pemerintah terhadap LSM melalui UU No. 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (kemudian diatur pula dengan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Keormasan, dan Inmendagri No. 8 tahun 1990 tentang Pembinaan LSM). Pada Pasal 19 UU No. 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan: "Lembaga Swadaya Masyarakat berperan sebagai penunjang bagi pengelolaan Lingkungan Hidup", sedangkan dalam penjelasannya LSM mencakup antara lain kelompok profesi, kelompok hobi dan kelompok minat.

Batasan, fungsi dan peran LSM dibandingkan dengan pengertian aslinya (dalam arti NGO) mengalami pergeseran. Keberadaan LSM terutama saat Orba yang sarat dengan intervensi politik pemerintah menyebabkan adanya beberapa LSM yang kemudian dalam pergerakannya memakai bentuk Yayasan, hal ini karena Yayasan lebih fleksibel menurut penilaian pemerintah dan mempunyai formalisasi berupa UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagai bukti pengakuan sekaligus pengaturan pergerakan oleh pemerintah terhadap organisasi masyarakat.

Dalam Inmendagri No. 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan LSM, disebutkan bahwa jenis-jenis LSM antara lain adalah: organisasi donor, organisasi mitra pemerintah, organisasi profesional dan organisasi oposisi. Jenis-jenis LSM tersebut digolongkan berdasarkan identitas yang didaftarkan, namun ada LSM yang berbentuk yayasan dan ada LSM yang tidak berbadan hukum melainkan sebuah perkumpulan seperti Kelompok Pecinta Alam.

2. Pengertian Organisasi Non Pemerintah/ LSM

Bank Dunia yang dikutip Bastian (2007:8) mendefinisikan NGO atau LSM sebagai organisasi yang kegiatannya ditujukan untuk membebaskan penderitaan, memajukan kepentingan kaum miskin, melindungi lingkungan, menyediakan pelayanan dasar masyarakat, atau menangani pengembangan masyarakat.

Menurut Bastian (2007:8), pengertian Ornop meliputi semua organisasi yang berada diluar jalur struktur atau jalur formal pemerintah dan tidak dibentuk oleh atau merupakan bagian dari birokrasi pemerintah. LSM merupakan

organisasi yang berbasis nilai yang secara keseluruhan atau sebagian tergantung pada lembaga donor dan pelayanan sukarela.

Inmendagri No. 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan LSM menyebutkan bahwa LSM adalah organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.

Jordan dan Peter (2009:12-13) menambahkan bahwa LSM melekat pada masyarakat sipil, yang berbeda dari masyarakat politik. Walaupun LSM dapat bersuara dalam perdebatan politik, mereka tidak bersatu untuk pemilihan umum atau mengendalikan tombol-tombol kekuasaan negara, seperti layaknya partai politik. LSM dapat juga memberikan pelayanan atau advokasi untuk mengangkat isu-isu tertentu.

Berdasarkan pengertian diatas mengenai LSM dapat disimpulkan bahwa LSM adalah organisasi non pemerintah dan non swasta yang diakui secara hukum, mandiri, kegiatannya dilakukan secara swadaya dan difokuskan pada upaya peningkatan taraf hidup masyarakat.

3. Ciri-Ciri LSM

Vakil dalam Jordan dan Peter (2009:12) mengatakan bahwa karakter utama dari sebuah LSM adalah mengatur diri sendiri, swasta, nirlaba dan memiliki

misi sosial yang jelas. Sedangkan menurut Clark dalam Bastian (2007:9), karakteristik khusus LSM dalam mengemban visi misinya adalah:

a. Memfokuskan pada kebutuhan masyarakat bawah dan berimplikasi terhadap kebutuhan organisasi dalam penyaluran informasi (*buttom up*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*);
b. Membuka peluang bagi partisipasi kelompok sasaran dalam proses pencapaian tujuan program, yaitu kemajuan dan pemberdayaan;
c. Memperkenalkan inovasi yang bermanfaat dan memecahkan masalah kelompok sasaran dengan biaya ringan dan mudah untuk diadaptasi, sesuai dengan kondisi masyarakat kelompok sasaran tersebut;
d. Skala program yang dilakukan LSM adalah skala kecil; hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pemantauan, pencapaian dan ketepatan sasaran;
e. Tingkat komitmen pada pimpinan atau staf LSM untuk merealisasikan apa yang menjadi idealisme, baik visi maupun misi untuk memberdayakan dan membantu kelompok sasaran yang miskin sangatlah tinggi. Komitmen dan motivasi inilah yang menjadi kekuatan pelaksanaan program;
f. Skala operasinya kecil sehigga semua biaya operasinya transparan, efektif, dan bebas dari kemungkinan tindakan korupsi.

Abidin dan Rukmini (2004:21) memberikan pendapat lain mengenai karakter LSM yang disederhanakan secara umum, yaitu sebagai berikut:

a. LSM adalah lembaga non pemerintah, yang secara jelas membedakannya dari birokrasi;
b. LSM didirikan dan dijalankan berdasarkan azas kesukarelaan;

c. LSM menjalankan kegiatannya tidak untuk membagikan keuntungan (nirlaba), yang membedakannya dari kegiatan lembaga usaha;
d. LSM dimaksudkan sebagai lembaga yang melayani masyarakat umum, bukan anggota atau para aktivisnya sendiri, sebagaimana dilakukan oleh koperasi atau asosiasi profesi.

Saragih (1995:5) juga memberikan pendapatnya tentang sifat yang terdapat dalam LSM, antara lain yaitu:

a. Bersifat nirlaba (*non profit*), didirikan bukan untuk mencari keuntungan;
b. Bukan perpanjangan tangan pemerintah, organisasi politik dan bisnis, tetapi independen;
c. Meningkatkan keswadayaan masyarakat;
d. Memperhatikan pelestarian alam.

Berdasarkan beberapa teori pendapat ahli diatas, SRS mendekati jenis yang disampaikan oleh Saragih (1995:5). SRS sejak awal berdiri berdasarkan kebutuhan pelestarian alam dengan dasar kesukarelaan dan bukan merupakan perpanjangan tangan politik pemerintah. Namun, dalam implementasinya, SRS bekerjasama dengan pemerintah untuk mengurusi beberapa hal yang bukan kewenangan SRS untuk menanganinya seperti permasalahan izin hukum.

4. Jenis-Jenis LSM

Berdasarkan kegiatan-kegiatan LSM yang ada di Indonesia, pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan LSM menggolongkan jenis-jenis LSM secara umum antara lain sebagai berikut:

a. Organisasi Donor

   Organisasi donor adalah organisasi non pemerintah yang memberikan dukungan biaya bagi kegiatan organisasi non pemerintah lain.

b. Organisasi Mitra

   Organisasi mitra adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan dengan bermitra dengan pemerintah dalam menjalankan kegiatannya.

c. Organisasi Profesional

   Organisasi profesional adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan berdasarkan kemampuan profesional tertentu seperti organisasi non pemerintah yang berfokus pada pendidikan, bantuan hukum, jurnalisme, pembangunan ekonomi, bantuan sosial dan lain sebagainya.

d. Organisasi Oposisi

   Organisasi oposisi adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan dengan memilih untuk menjadi penyeimbang dari kebijakan pemerintah. Organisasi jenis ini bertindak melakukan kritik dan pengawasan terhadap keberlangsungan kegiatan pemerintah.

Fakih dalam Bastian (2007:41) mengkategorikan LSM sebagai berikut:

a. Konformis, merupakan LSM yang melakukan pendekatan berdasarkan paradigma bantuan karikatif;
b. Reformis, merupakan LSM yang mendasarkan diri pada ideologi modernis-developmentalis;
c. Transformatif, merupakan LSM yang dicirikan dengan mempertanyakan paradigma *mainstream* yang ada di balik ideologi tersembunyi.

Menurut Tandon dalam Jurnal Akuntabilitas Eksistensi Organisasi Non Pemerintah dalam Perspektif *Governance* yang ditulis oleh Hermawan, dkk mengatakan bahwa ada beberapa bentuk Ornop yang *governance*, diantaranya yaitu: pertama, *family boards*. Karakteristik umum dari kebanyakan Ornop memandang Ornop seperti keluarga mereka. Fungsi-fungsi lembaga dijalankan seperti sebuah keluarga, seperti adanya informalitas, kasih sayang, dan kepercayaan satu sama lain. Kedua, *invisible boards*. Umumnya Ornop memiliki *invisible board* yang terdiri dari sekumpulan teman-teman dekat dan keluarga dan para pendiri Ornop yang menjadi tim kerja informal.

Ketiga, *staff board*. Staf lembaga adalah orang-orang yang diberikan kebebasan untuk menentukan sikap setelah berdialog dengan visi lembaga. Keputusan sepenuhnya diserahkan kepada orang-orang yang direkruit oleh Ornop, untuk bergabung atau tidak. Namun setelah mereka memutuskan bergabung, maka lembaga juga akan melakukan pembangunan dan penguatan staf agar mereka semakin menyatu dalam lingkungan internal Ornop. Keempat, *professional boards*. Ornop yang *governance* juga mempertimbangkan profesionalitas kelembagaan yang ditandai dengan adanya sistem formal pertemuan, diskusi, pengambilan keputusan dan perekaman (kertas agenda, jadwal waktu, dan lainnya), pertanggungjawaban setiap individu dan kelompok dari setiap beban kerja yang diberikan, audit kinerja dan penilaian kelembagaan.

Berdasarkan beberapa teori diatas, SRS termasuk kedalam unit organisasi non pemerintah profesional. Namun SRS juga memiliki ciri yang sama dengan *family boards* dan *invisible boards*.

5. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat

LSM lahir dan berkembang di masyarakat berdasarkan kebutuhan untuk memandirikan masyarakat. Namun faktanya, dalam implementasi, suka atau tidak suka LSM dan masyarakat tetap membutuhkan dukungan-dukungan dan legalitas formal dari pemerintah sebagai kekuatan hukum. Peran LSM kemudian menjadi bertambah dan semakin beraneka ragam. Saragih (1995:1-2) mengatakan bahwa sesuai namanya LSM mempunyai peran penting dalam mendampingi masyarakat. Mendampingi berarti mengembangkan hubungan kesejajaran, hubungan tersebut antara dua subjek yang dialogis. Pendamping dan kelompok yang didampingi adalah subjek, kemudian yang menjadi objek adalah keluhan, kebutuhan, masalah kelompok dampingan. Saragih (1995:2) menambahkan bahwa pendampingan sosial adalah suatu strategi untuk mengembangkan partisipasi masyarakat. Sasarannya adalah untuk menuju kemandirian.

Kartjono dalam Saragih (1995:2) mengingatkan bahwa swadaya berarti mendasarkan sesuatu pada kekuatan sendiri. Mandiri berarti mampu memilih, menentukan dan memutuskan sendiri apa yang baik untuk dirinya atau kelompoknya. Jika ada faktor dari luar sifatnya adalah mempengaruhi, bukan menentukan.

Abidin dan Rukmini (2004:21) menjelaskan bahwa dalam demokrasi yang terbuka dan transparan, LSM berperan sebagai penghubung dan penengah dari berbagai kepentingan yang belum terwakili oleh partai politik dan Ormas. Dalam peran ini LSM melakukan kegiatan advokasi non-partisan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan publik. Peran lain LSM adalah menyediakan jasa pelayanan (sosial) kepada masyarakat, peran ini merupakan fungsi tambahan dari lembaga pemerintah maupun swasta.

Selain itu, menurut Hikam dalam Gustiance (2016:28), sesuai dengan karakteristiknya, lembaga masyarakat nirlaba pada umumnya membawa misi penguatan dan pemberdayaan masyarakat di luar sektor negara dan sektor swasta. Lebih lanjut Hikam dalam Gustiance (2016:28) menambahkan peranan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sangat penting dalam pemberdayaan yakni karena kemampuan LSM memperkuat masyarakat akar rumput melalui berbagai aktivitas pendampingan, pembelaan, dan penyadartahuan.

Bastian (2007:35) mengemukakan pendapatnya tentang peran LSM yaitu sebagai penumbuh partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara mandiri. Kemudian Hadad dalam Bastian (2007:35) menambahkan bahwa dalam melaksanakan programnya, LSM mempunyai peran sebagai berikut:

1. Motivator

   LSM bertugas memberikan motivasi, menggali potensi, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran anggota masyarakat akan masalah-masalah yang dihadapi dirinya maupun lingkungannya, tentang potensi-potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki.

Kesadaran tersebut dimaksudkan sebagai langkah memperbaiki nasib dan membangun masa depan yang lebih baik atas potensi dan swadaya masyarakat itu sendiri.

2. Komunikator

   Sebagai komunikator, tugas LSM antara lain yaitu: (a) Mengamati, merekam, serta menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat agar dijadikan bahan rumusan kebijakan dan perencanaan program pembangunan. (b) Mengawasi program pembangunan masyarakat. (c) Memberi penyuluhan dan menjelaskan program-program pembangunan dengan bahasa yang akrab dan kerangka berfikir yang mudah dipahami masyarakat. (d) Membantu melancarkan hubungan dan kerja sama antar LSM yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama dalam masyarakat.

3. Dinamisator

   LSM bertugas merintis strategi, mengembangkan metode program, dan memperkenalkan inovasi di bidang teknologi serta pengelolaan organisasi yang belum dikenal ke lingkungan masyarakat setempat untuk pengembangan dan kemajuan masyarakat lokal.

4. Fasilitator

   Peran LSM sebagai fasilitator adalah memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaan program seperti menyediakan bantuan dana, modal kerja, peralatan, bahan-bahan baku, saluran pemasaran, dan sebagainya bagi kelompok-kelompok sasaran yang membutuhkannya.

Sedangkan menurut Azra dalam Gustiance (2016:28), LSM memegang peranan signifikan dalam *political opportunities* untuk memerantarai persoalan-persoalan publik dengan negara. LSM dengan negara dalam kerangka memediasi kepentingan warga didasari atas tiga paradigma yaitu:

1. Bersifat komplementer dengan maksud memajukan kesejahteraan melalui beragam aktifitas yang ditujukan untuk melengkapi peran negara sebagai pelayan publik (*public service*);
2. Bersifat subsitutif, artinya kalangan LSM melakukan serangkaian aktivitas yang belum atau tidak dilakukan negara dalam kaitannya sebagai institusi yang melayani kepentingan masyarakat luas;
3. Sebagai kekuatan tandingan negara atau *counterbalancing the state* atau *counterveiling forces* yakni dengan melakukan advokasi, pendampingan, ligitasi, bahkan praktik-praktik oposisional untuk mengimbangi kekuatan hegemonik negara atau paling tidak menjadi wacana alternatif di luar wacana dominan negara.

C. Tinjauan tentang Akuntabilitas Ornop/LSM

1. Sejarah Ringkas Akuntabilitas Ornop/LSM

Dalam kurun waktu 25 tahun, persepsi mengenai akuntabilitas LSM bermula sebagai hasil sampingan dari paradigma yang berlaku mengenai peranan LSM dalam paradigma pembangunan telah mempengaruhi perbedaan penekanan dalam diskusi tentang akuntabilitas LSM. Berikut adalah sejarah pendek akuntabilitas LSM.

Silogisme Pertama: Melengkapi Peranan Pemerintah (1980-1989)

a. Pemerintah tidak baik dalam menyediakan pelayanan publik;
b. LSM lebih dekat dengan publik;
c. LSM baik dalam menyediakan pelayanan publik.

Persepsi tentang akuntabilitas LSM terfokus pada akuntabilitas finansial, kapasitas organisasi, efisiensi dan kinerjanya. Paradigma yang populer adalah memberikan kepercayaan sebesar-besarnya kepada pasar, mengecilkan negara dan memberikan tugas pelayanan publik kepada LSM. LSM dianggap lebih unggul dalam dibandingkan sistem kerja pemerintah karena LSM merupakan kekuatan swasta dan memiliki reputasi yang baik dalam mendekati penduduk miskin. LSM kemudian menuntut porsi yang lebih besar untuk menyalurkan bantuan, dan seiring dengan itu mereka bergeser dari organisasi yang berfokus pada pemberian bantuan darurat dan karikatif menjadi pelaku pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada rakyat. Hanya akuntabilitas finansial yang dilakukan saat itu.

Silogisme Kedua: Munculnya Masyarakat Sipil (1989-1995)

a. Masyarakat sipil diperlukan dalam demokrasi;
b. LSM adalah masyarakat sipil;
c. LSM baik untuk perkembangan demokrasi.

Persepsi mengenai akuntabilitas LSM berfokus pada kualitas tata kelola internal serta perumusan dari tujuan dan perilaku organisasinya (kode etik dan uraian misinya). Meningkatan kapasitas LSM agar dapat memikul tanggungjawab yang baru sebagai pelopor demokrasi menjadi wacana dominan tentang pengelolaan LSM dalam kurun waktu tersebut. para

pengkritik sudah membawa pertanda akan terjadinya pergeseran paradigma yang baru melalui berbagai perdebatan mengenai perluasan dampak kegiatan atau peningkatan kualitas intervensi LSM, serta munculnya pola hubungan baru antar warganegara. Persepsi tentang akuntabilitas berfokus pada kualitas tata pengurusan internal dan perumusan dari tujuan dan perilaku organisasi.

Silogisme Ketiga: Perlunya *Good Governance* (1995-2002)

a. *Good governance* diperlukan dalam pembangunan;
b. LSM tidak berbeda dengan berbagai organisasi lain dalam masyarakat sipil;
c. LSM harus menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Persepsi tentang akuntabilitas LSM berfokus pada legitimasi dan pengembangan sebagai lembaga yang mengatur diri sendiri atau mekanisme akreditasi yang independen. Debat besar mengani globalisasi mulai meminggirkan berbagai paradigma pembangunan dan mengubah kerangka pemikiran dimana terdapat juga wacana akuntabilitas LSM. LSM sebagai suatu fenomena dan peranan LSM dalam globalisasi serta pembangunan mulai diperdebatkan. LSM menjadi bungkus populer untuk membicarakan masalah globalisasi. Dalam kurun waktu ini terjadi perdebatan yang lebih panas mengenai akuntabilitas LSM. LSM merespon dengan mengembangkan mekanisme akreditasi dan pola pengaturan diri yang independen melalui pembentukan federasi dan asosiasi.

Silogisme Keempat: Kembalinya Supremasi Hukum (2002 dan seterusnya)

a. Pemerintah berperan penting untuk menjamin keselamatan dan pembangunan;
b. Perngaruh LSM tidak sebanding dnegan kualifikasi yang dimilikinya;
c. LSM harus tetap berada dalam kerangka kerja pemerintah yang sah.

Persepsi mengenai akuntabilitas LSM berfokus pada penelitian terhadap kredibilitasnya dan penerimaannya terhadap peraturan eksternal (negara). Sejak tahun 2001 hingga sekarang, wacana mengenai akuntabilitas LSM ditandai dua aspek utama. Pertama, mencerminkan tema-tema yang lebih besar dalam wacana pembangunan dan globalisasi. Kedua, kembalinya sentralitas atau supremasi negara. Sejumlah negara merasa bahwa mereka sudah terlalu banyak memberikan otoritasnya kepada LSM atau badan-badan swasta lain. Pertauran tentang LSM mulai diperketat.

Silogisme Kelima: Pendekatan Berdasarkan Hak-Hak Asasi (2002 dan seterusnya)

a. Tidak ada tata pemerintahan global demokrasi yang mendukung hak-hak asasi manusia;
b. LSM menegaskan dan mengukuhkan hak-hak asasi manusia diberbagai arena politik apapun bentuk tata pemerintahan yang berlaku disana;
c. LSM ikut mengembangkan tata pemerintahan yang demokratis dengan menekankan arti penting kebijakan publik serta mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan publik.

Persepsi tentang akuntabilitas LSM berfokus pada penyeimbangan berbagai tanggungjawab kepada konstituen atau pemangku kepentingan yang

berbeda-beda, dengan menggunakan berbagai mekanisme yang mengutamakan akreditasi daripada regulasi. Harapan masyarakat terhadap akuntabilitas LSM terkait dengan misi dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal itu mungkin jauh lebih canggih daripada mekanisme aturan dan pengendalian yang diinginkan pemerintah dan korporasi terhadap LSM. Suatu pendekatan terhadap akuntabilitas LSM yang berdasarkan hak-hak asasi tampaknya dapat memenuhi harapan masyarakat.

2. Definisi Akuntabilitas LSM/Ornop

Rustam dalam Abidin dan Rukmini (2004:620, akuntabilitas LSM adalah suatu proses dimana LSM menganggap dirinya bertanggungjawab secara terbuka mengenai apa yang diyakininya. Secara operasional, akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk pelaporan, pelibatan, dan cepat tanggap. LSM bertanggungjawab atas semua nilai-nilai yang dianutnya, apa yang dilakukan atau tidak dilakukannya, kepada semua stakeholder (kelompok sasaran, lembaga donor, sesama Ornop, pemerintah dan masyarakat luas). Pertanggungjawaban meliputi semua program dan kegiatan yang dilakukan dan diwujudkan dalam bentuk dana yang diperoleh dan dikeluarkan, hasil-hasil yang dicapai, keterampilan dan keahlian yang dikembangkan, dan lai sebagainya. Cara mempertanggungjawabkannya adalah melalui mekanisme pelaporan yang jujur dan transparan, mudah diperoleh dan dijangkau oleh masyarakat.

Jordan dan Peter (2009:14-19), akuntabilitas adalah konsep normatif yang terbentuk oleh masyarakat dan selalu terkait dengan interpretasi atas fakta-fakta, lingkungan, tindakan atau sikap tertentu. Kemudian Hermawan, dkk. dalam jurnal berjudul Aksistensi Akuntabilitas Organisasi Non Pemerintah dalam Perspektif *Governance* (Studi Pada YLPMD Lampung) mengatakan bahwa akuntabilitas Ornop dalam perspektif *governance* adalah interaksi, keterkaitan dan saling keterhubungan dalam keterbukaan dan pertanggungjawaban antara Ornop dengan berbagai komponen yang ada di masyarakat dalam kerangka pengendaliaan keputusan dan tindakan Ornop agar tetap sesuai dengan nilai, kebutuhan dan harapan masyarakat dan *stakeholder*nya, seperti yaitu koalisi Ornop, kelompok binaan, national *government*, *official donors*, parlemen, *citizen* dan institusi sosial lainnya.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, disimpulkan bahwa akuntabilitas Ornop adalah keterbukaan Ornop terhadap berbagai komponen yang berhubungan dengannya tentang setiap kegiatan dan laporan lainnya dengan transparan dan aksesibel.

3. Transparansi dan Akuntabilitas Ornop/LSM

a. Harlans M Fachra

Fachra dalam Abidin dan Rukmini (2004:71-74), mangungkapkan alasan pentingnya LSM/Ornop melakukan akuntabilitas. Menurut Fachra, masalah-masalah yang dialami Ornop saat ini menimbulkan masalah sehingga perlu dipertegas tentang mengapa harus transparan? Kepada siapa harus transparan dan akuntabel? Serta sejauh apa

transparansi dan akuntabilitas dilakukan? Lebih lanjut Fachra menjelaskan alasan melakukan akuntabilitas bagi LSM/Ornop adalah karena perannya sesuai dengan bidang kegiatan LSM/Ornop tersebut. Ornop pro demokrasi misalnya, harus melakukan akuntabilitas karena demokrasi sendiri mengandung unsur akuntabilitas. Intinya, Ornop harus lebih baik dari pihak yang dikritik atau yang di advokasi. Selain itu, akuntabilitas penting untuk menjaga keutuhan organisasi.

Selanjutnya adalah tentang kepada siapa harus transparan dan akuntabel? Menurut Fachra, akuntabilitas dilakukan sesuai dengan siapa yang menjadi relasi dan konstituen LSM/Ornop tersebut. Adakah yang diwaliki kepentingannya? Dengan siapa dia bermitra? Hal tersebut akan membantu Ornop menemukan pihak yang kepadanya harus dilakukan transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, Harlans menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas kepada internal Ornop harus tetap diutamakan.

Beberapa Ornop memang dituntut untuk transparan dan akuntabel, maka harus dibangun kesepakatan-kesepakatan umum tentang bagaimana transparansi dan akuntabilitas tersebut dilaksanakan, supaya ornop dapat melaksanakan kegiatan dengan baik dan leluasa. Beberapa prinsip umum transparansi dan akuntabilitas yang dapat dilakukan paling tidak sebagai berikut:

1. Adanya catatan finansial dan kegiatan yang cukup rinci beserta bukti-bukti memadai sebagai bahan laporan;

2. Adanya tim pemeriksa independen yang mempunyai akses cukup untuk memeriksa keuangan dan manajemen operasional Ornop;
3. Adanya public *disclosure*, laporan-laporan yang dibuat berdasarkan catatan-catatan diatas dibuka untuk kalangan internal dan eksternal. Laporan ini harus dimuat dikoran harian atau meedia lain yang dapat diakses masyarakat luas. Ornop yang konstituennya terbatas, cukup dengan memuat laporan baik keuangan maupun kegiatan diterbitan buletin atau media internal yang ada dan kemudian disebarkan pada konstituen.

b. Kamalia Purbani

Purbani dalam Abidin dan Rukmini (2004:137-139) memberikan pandnagannya tentang akuntabilitas LSM dari perspektif Pemerintah Daerah. Menurut Purbani, proses akuntabilitas tidak dapat secara realistis diharapkan seragam untuk semua kisaran aktivitas LSM yang luas. Metodologi akuntabilitas harus dapat dikembangkan secara imajinatif pada setiap konteks ketika mekanisme tertentu tidak jalan. Meskipun demikian, sistem akuntabilitas apapun harus mengakui transparansi sebagai kriteria utama dan spesifik untuk menyediakan informasi tertentu pada setiap kesempatan.

1. Basic Framework

   Tuntutan akan akuntabilitas Ornop pada masa kini lebih luas dari sekedar prosedur finansial, tetapi lebih kepada melaporkan tentang hubungan, maksud, tujuan, metode dan dampak, yang memerlukan informasi kualitatif fan kuantitatif. Proses akuntabilitas harus

diawali dengan mengidentifikasi hak-hak yang terlibat dalam program LSM. *Stakeholder* yang relevan, dan penyandang tugas dari hak serta isi dari tugas pada situasi tertentu. Dari analisis tugas dan hak, LSM kemudian mengidentifikasi tugas spesifiknya dan mengemukakan laporan tentang hal tersebut sementara tanggungjawab masing-masing dijalankan.

2. Pihak yang Diberi Pertanggungjawaban

   LSM bertanggungjawab kepada kelompok orang berbeda, bisa kepada pemegang hak, beberapa pemegang tugas, *stakeholder* sekunder, tertier diluar *stakeholder* promer yang bertindak sebagai pengawal kritis dan interes.

3. Cara Mempertanggungjawabkan

   Stakeholder yang berbeda akan memerlukan laporan dengan cara yang berbeda. Beberapa pihak akan mensyaratkan angka, sementara yang lain mensyaratkan angka dan dampak, ada yang meminta detail sementara yang lain hanya butuh poin utama. Proses akuntabilitas harus pula melibatkan *stakeholder* kunci melalui pertemuan yang representatif, riset, majelis yang representatif atau sistem *voting*. Tetapi, dasar mekanisme akuntabilitas LSM adalah kejujuran dan keterbukaan. Hal yang diungkapkan LSM tentang dirinya atau laporan yang disampaikan harus layak dan benar, dapat diperoleh dengan mudah dan aksesibel bagi semua orang.

4. Transparansi dan Akuntabilitas LSM/Ornop Perspektif Pemerintah Daerah dari Sisi Kepentingan

   Berulirnya Orde Baru menjadi Reformasi berdampak pada diterimanya bantuan dana dari luar negeri yang mensyaratkan keterlibatan LSM sebagai representasi masyarakat, sehingga LSM mulai diminta untuk terlibat memberikan masukan dalam perumusan kebijakan publik. Beberapa hal pokok yang umumnya dijadikan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan akuntabilitas dan transparansi LSM adalah sebagai berikut:

   a. Mempunyai legal basis yang jelas;
   b. Susunan kepengurusan dan alamat yang jelas;
   c. Anggota yang cukup kapabel dan kompeten;
   d. *Platform* organisasi yang jelas;
   e. Demokratis dalam menentukan kebijakan;
   f. Tidak terlalu menggantungkan diri kepada dana pemerintah;
   g. Kegiatannya tidak dipengaruhi oleh pemberi dana yang bisa berdampak tidak memiliki sikap dan karakter organisasi yang jelas;
   h. Memiliki sistem pertanggungjawaban keuangan yang jelas.

c. Adhi Santika

Santika dalam Abidin dan Rumini (2004:109), sebagai suatu Ornop yang memiliki visi misi, tujuan dan sasaran, harus menjalankan strategi untuk mencapainya. Ornop sangat membutuhkan syarat pokok berupa kemampuan membangun identitas dna kredibilitas dilingkungannya,

baik masyarakat maupun pemerintah. LSM perlu membenahi dirinya untuk leboh terfokus, terjangkau dan terbuka dalam setiap kegiatannya. Berdasarkan pemikiran tersebut, prinsip akuntabilitas dan transparansi diterapkan melalui peningkatan kinerja:

1. LSM perlu mengubah strategi dari kebiasaan hanya menyampaikan isu menjadi LSM dengan pola kerja yang menekankan pada pemberian alternatif pemecahan masalah, baik dalam bentuk formal maupun non formal;
2. LSM perlu mendapatkan beberapa isu penting yang akan dikerjakan secara konsisten dengan mendasarkan kepada ketetapan konsep yang kontekstual;
3. LSM harus mampu membangun dan memperluas jaringan komunikasi dengan berbagai pihak baik sesama LSM maupun lembaga pemerintah;
4. LSM dinilai perlu untuk mengembangkan berbagai upaya yang berakibat keberadaannya dapat terjangkau oleh komunitas lokal dan akar rumput;
5. LSM perlu menegaskan identitasnya dengan memajukan prinsip-prinsip dasar manajemen dan sekaligus menunjukkan pada masyarakat metode kerjanya.

d. Edwards dan Hulme

Pendapat lain dikemukakan oleh Edwards dan Hulme yang dikutip Hermawan dalam jurnalnya yang berjudul Akuntabilitas NGO dan Kontrol Publik bahwa ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh

NGO untuk mewujudkan NGO yang akuntabel sehingga kontrol publik akan berjalan efektif, diantaranya adalah: Pertama, tujuan yang jelas dari NGO akan menunjukkan apakah eksistensi dan peranannya di masyarakat memiliki keterkaitan yang jelas atau tidak, dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, transparansi laporan mengenai asal, alokasi dan pengunaan *resources* secara jujur. Ketiga, transparansi selanjutnya berkaitan dengan kejelasan dan keterbukaan terhadap hubungan yang dibangun dengan berbagai pihak, baik secara internal maupun eksternal. Keempat, laporan kinerja program yang dapat diakses oleh publik. Kelima, pelibatan masyarakat dalam proses pembuatan, pelaksanaan dan evaluasi program. Keenam, membuka ruang kontrol bagi publik.

e. Ebrahim

Hasil penelitian Ebrahim dalam jurnal Hermawan, dkk yang berjudul Akuntabilitas Eksistensi Organisasi Non Pemerintah dalam Perspektif *Governance* (Studi pada YLPMD Lampung) memaparkan tujuh proporsi terkait *learning organizations* dalam Ornop, yaitu: pertama, akuntabilitas lebih diutamakan kepada akuntabilitas internal atas misi organisasi, daripada akuntabilitas terhadap donor, panduan informasi dan sistem pelaporan. Kedua, pemahaman staf bahwa evaluasi adalah sebagai inti pekerjaan mereka, bukan sebagai tugas yang dilakukan hanya untuk manager dan para ahli. Ketiga, menjadikan kesalahan sebagai peluang dan meminimalisir ancaman sanksi. Keempat, kapasitas organisasi dibangun untuk mengantisipasi dan merespon

ketidakstabilan lingkungan. Kelima, pelaporan struktur internal dilakukan untuk mempertahankan umpan balik yang kuat antara staf lapangan, manajer, dan direktur. Keenam, ada *job description* dan imbalan yang diberikan atas kinerja staf untuk analisis dan inovasi, didukung oleh sumber daya waktu dan fleksibel. Ketujuh, sistem informasi sederhana dan fleksibel, bukan rumit atau ketat, serta jarak antara pengguna dan pemilik informasi diminimalisir.

Berdasarkan teori beberapa ahli diatas, maka penelitian ini tidak dapat dikategorikan dengan kecocokan kepada teori salah satu ahli saja. Hal ini karena jika dilihat dari dari teori Adisasmita, lebih cocok digunakan untuk mengukur akuntabilitas organisasi pemerintah daripada organisasi non pemerintah. Namun, ada beberapa indikator yang cocok diterapkan dalam organisasi non pemerintah, diantaranya yaitu indikator kepemimpinan yang berkemampuan, indikator kordinasi, dan indikator perlu pemahaman masyarakat. Kemudian akan digunakan juga teori keberhasilan Ornop dari Edwards *and* Hulme, dan Ebrahim.

4. Hubungan antara Ornop dengan Pemerintah, Lembaga Donor, dan Swasta

a. Hubungan dengan Pemerintah

Tim Fasilitas LP3ES yang dikutip Abidin dan Rukmini (2004:172-175), dalam berhubungan dengan pemerintah kepentingan yang paling pokok diperjuangkan adalah agar pemerintah dengan kebijakannya menciptakan iklim dan lingkungan yang kondusif dengan memberikan

ruang gerak dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi LSM untuk beroperasi dan berkembang. Untuk itu dibutuhkan beberapa hal berikut: pertama, jaminan konstitusional berupa kebebasan berserikat bagi setiap warga negara. Kedua, adanya peraturan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah bahwa LSM dapat bekerja secara independen dengan berbagai kegiatannya pada tingkat lokal, regional, nasional, dan internsional tanpa hambatan.

Ketiga, menjamin akses LSM terhadap sumber daya dari berbagai sumber untuk melaksanakan kegiatannya dari pemerintah, lembaga-lembaga penyandang dana internasional dan domestik, sektor swasta, donasi publik serta individual. Keempat, pemerintah dari waktu ke waktu harus melakukan konsultasi dengan LSM yang dilandasi dengan semangat kemitraan. Perumusan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi kerja dan kepentingan LSM harus dilakukan melalui konsultasi serta pemberian informasi kepada kalangan LSM terlebih dahulu. Kelima, memberikan akses sumber daya kepada LSM dalam bentuk hibah atau kontrak-kontrak yang caranya disesuaikan dengan kepentingan LSM yang tidak akan menghilangkan independensi dan tidak mendistorsi tujuan LSM itu sendiri. Pemerintah juga dapat mendorong dana dari sektor swasta kepada LSM dengan memberikan insentif berupa penghapusan atau pengurangan pajak bagi keuntungan mereka yang dihibahkan kepada LSM.

b. Hubungan dengan Lembaga Penyandang Dana

Pertama, LSM berkepentingan bahwa, hubungannya dengan donor sebagai institusi yang menyediakan dana selalu didasarkan atas filosofi dan kebijakan yang bersemangat kemitraan, sikap saling menghormati, karena pada dasarnya keduanya mempunyai visi dan tujuan yang sama. Kedua, LSM berkepentingan agar lembaga dana dalam merumuskan kebijakan pemberian dananya perlu memberikan konsultasi dan informasi secara jelas mengenai semua hal yang berhubungan dengan pendanaan seperti: strategi dan prioritas program, kriteria LSM yang dapat memperoleh dana, dan sebagainya. Ketiga, LSM berkepentingan bahwa lembaga penyandang dana berbuat transparan dalam menjelaskan berbagai hal yang berhubungan dengan misi, sasaran, kebijakan, aktivitas, cara pengambilan keputusan serta metode dan prosedur untuk mendapatkan dana.

Jordan dan Peter (2009:169-173) mengatakan bahwa ada enam alasan mengapa akuntabilitas donor perlu dilakukan yang dikutip dari beberapa sumber. Pertama, karena banyak bantuan pemerintah berasal dari perolehan pajak yang dikumpulkan dari para warga negara dan organisasi-organisasi. Karena itu, bantuan pemerintah melalui bantuan pembangunan dan kemanusiaan merupakan kepentingan publik (Action Aid, 2005). Kedua, banyak praktek donor privat ditambahkan oleh dana-dana publik dalam bentuk pemotongan pajak pemerintah-pemerintah bagi individu-individu, perusahaan-perusahaan, atau yayasan-yayasan amal. Karena itu pertanyaan tentang apa yang

menetukan bentuk amal dari donasi serta kegiatan yang didanainya adalah masalah kebijakan publik yang sudah terumus jelas (Irvin, 2005). Ketiga, keprihatinan yang semakin besar terhadap pendanaan kegiatan terorisme internasional. Karena itu, menjadi tantangan untuk memastikan bahwa hanya kegiatan yang bukan kekerasan yang didanai oleh donor manapun, yang berstatus donor amal atau tidak (Baron, 2004).

Keempat, tuntutan-tuntutan akan akuntabilitas kepada para donor tidak berfungsi dalam arti mengganggu perubahan sosial yang menguntungkan. Tuntutan-tuntutan akan akuntabilitas pemerintah dapat menjadi problematis dalam hal ini (Irvin, 20015). Kelima, karena beberapa donor sendiri mengusahakan pencairan bantuannya atau hibah untuk mendukung keadilan sosial dan kesejahteraan. Akuntabilitas donor sendiri kepada para penerima manfaat yang dimaksudkan dapat dianggap sebagai mekanisme yang berguna untuk meningkatkan efektivitas intervensi-intervensi filantropis donor menyangkut sejumlah masalah yang berbeda-beda, dari masalah kemiskinan sampai perlindungan lingkungan.

Keenam, karena skala dana-dana yang diberikan oleh publik dan swasta telah menjadi cukup besar untuk berdampak signifikan pada sifat dasar alokasi sumberdaya, pembuatan keputusan dan opini publik dalam masyarakat-masyarakat diseluruh dunia. Pertanyaan tentang bagaimana dana-dana ini mengembangkan aset finansial orang-orang

yang sudah berkuasa, organisasi-organisasi dan pemerintah-pemerintah menjadi kekuatan sosial, budaya dan politis dalam bentuk yang lebih luas.

c. Hubungan dengan Sektor Swasta

Sektor swasta dapat menjadi salah satu potensi pendanaan bagi kegiatan LSM. Masalahnya adalah bagaimana cara atau mekanisme pemberian bantuan tersebut dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel. Meskipun sampai sekarang secara umum hubungan LSM degan swasta tidak begitu baik karena kaitan antara kaum konglomerat dimasa lalu yang begitu dekat dnegan kekuasaan, besarnya tingkat kolusi antara swasta dan pemerintah, serta banyaknya aktivitas swasta yang merugikan masyarakat dan merusak lingkungan, namun saat ini perusahaan-perusahaan dibanyak negara terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan LSM. Banyaknya yayasan yang didirikan perusahaan-perusahaan swasta untuk menampung dana perusahaannya sendiri dan menghindari pajak, LSM berkepentingan agar dana perusahaan dibeikan melalui mekanisme dan prosedur yang memungkinkan akses terhadap dana menjadi lebih luas dan dapat dipergunakan oleh LSM-LSM lain yang bukan haya yayasan bentukan perusahaan tersebut.

D. Kerangka Pikir

Masalah lingkungan bukan lagi menjadi masalah pemerintah saja, tetapi sudah menjadi kewajiban bersama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Menjaga keseimbangan lingkungan penting untuk menjaga keseimbangan

kehidupan antar makhluk hidup, hal ini berarti ketidakseimbangan lingkungan akan menjadikan ketidakseimbangan kehidupan. Pada zaman demokratisasi saat ini, semakin banyak masyarakat yang tersadarkan akan pentingnya menjaga lingkungan oleh individu-individu manusia demi kelanjutan kehidupan berdampingan yang damai dengan makhluk hidup lain. Kesadaran individu yang kemudian terhimpun dalam sebuah kelompok pada gilirannya membentuk sebuah organisasi berbadan hukum yang sah dan diakui untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kelangsungan keseimbangan ekosistem alam.

Kelompok berbadan hukum yang disebut sebagai LSM tersebut mempunyai identitas masing-masing sesuai dengan fokus masalah yang dibidangi. Pada permasalahan lingkungan, ada SRS sebagai organisasi non pemerintah profesional yang saat ini udah menjadi unit atau bagian dari YABI, berfokus pada kegiatan konservasi badak sumatera sebagai hewan langka. SRS didirikan sebagai solusi atas kekhawatiran semakin banyaknya perburuan liar dan pengrusakan hutan yang menyebabkan populasi badak sumatera semakin sedikit dan sudah memasuki kategori hewan langka di dunia karena keberadaannya yang hampir punah.

Akuntabilitas organisasi kemudian bukan sekedar menjadi sebuah kewajiban, tetapi sudah menjadi kebutuhan bagi organisasi itu sendiri untuk menjaga stabilitas kepercayaan publik dan mitra terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Selain itu, akuntabilitas sangat penting untuk menjaga kondisi internal organisasi, akuntabilitas juga diperlukan untuk

menjaga kepercayaan donor sebagai pihak yang membantu pendanaan organisasi. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis akuntabilitas dari SRS dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai unit organisasi non pemerintah profesional yang berfokus pada kegiatan konservasi badak sumatera, maka peneliti melakukan penelitian melalui beberapa teknik penelitian untuk mencari, menemukan dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung keberhasilan akuntabilitas SRS.

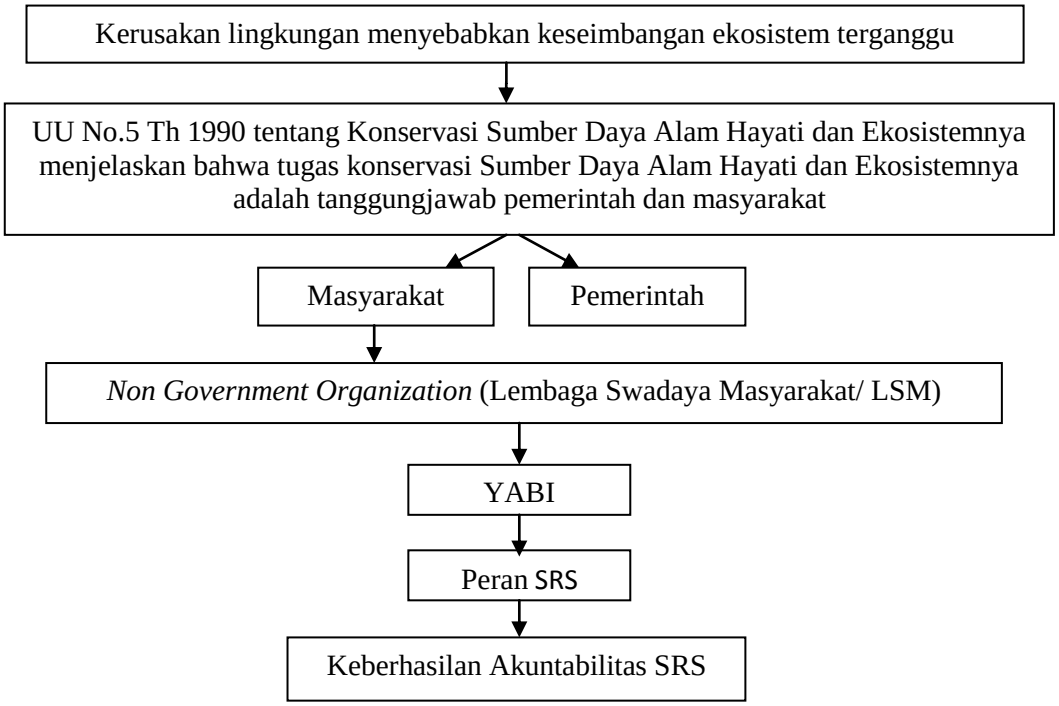

Sumber: *Diolah Oleh Peneliti Tahun 2017*

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *grounded theory*. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *grounded theory* sesuai dengan konsep dari Creswell dalam Sugiyono (2011:14) yang menjelaskan bahwa jenis penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam melalui deskripsi, analisis dan eksplorasi mendalam terkait dengan realitas dan proses akuntabilitas program SRS ditengah masyarakat. Kemudian pendekatan *grounded theory* digunakan untuk membangun teori yang bermula dari data baik dalam bentuk lahirnya teori baru ataupun memperluas dan memodifikasi teori yang ada.

Penelitian ini menunjukkan kehidupan masyarakat disekitar SRS, sejarah terbentuknya SRS, tingkah laku juga tentang fungsionalisasi SRS, mekanisme dan sasaran pertanggungjawaban LSM SRS, pergerakan-pergerakan sosial yang dilakukan SRS secara mandiri ataupun dengan mitra, atau hubungan kekerabatan yang terjalin antar pegawai SRS, SRS dengan Badan TNWK (BTNWK), SRS dengan masyarakat, serta SRS dengan YABI.

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah untuk menemukan, memahami, dan menjelaskan tentang keberhasilan akuntabilitas program SRS dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unit organisasi non pemerintah profesional.

B. Fokus Penelitian

Sugiyono (2011:288) mengatakan bahwa penentuan fokus dalam penelitian lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi dilapangan. Melalui bimbingan dan arahan fokus, peneliti dapat mengetahui data mana dan data tentang apa yang perlu dikumpulkan dan data mana yang walaupun mungkin menarik, karena tidak relevan tidak perlu dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada indikator keberhasilan akuntabilitas Ornop dari beberapa teori yaitu Ebrahim dalam Jurnal Akuntabilitas Eksistensi Ornop dalam Perspektif *Governance* yang ditulis oleh Hermawan, dkk; Edwadrs *and* Hulme dalam jurnal Hermawan yang berjudul Akuntabilitas NGO dan Kontrol Publik; dan Adisasmita 2011:87. Berikut adalah indikator keberhasilan akuntabilitas dari teori ketiga pakar tersebut:

1. Kepemimpinan yang berkemampuan

   Indikator ini digunakan untuk mencari tahu tentang kemampuan pemimpin SRS untuk mengupayakan akuntabilitas bagi SRS dengan sikap yang responsif, sensitif, dan akuntabel serta transparan kepada bawahan dan masyarakat.

2. Sistem koordinasi internal yang baik

   Indikator ini digunakan untuk memahami koordinasi internal SRS dan YABI, serta hubungan non formal yang pada gilirannya akan diketahui kondusifitas internal organisasi.

3. Komunikasi yang Baik dengan Mitra

   Indikator ini digunakan untuk mengetahui dan memahami hubungan kerjasama yang dijalin oleh SRS dengan instansi dan Ornop lain.

4. Standar Kegiatan dan Pembagian Tugas yang Jelas

   Indikator ini digunakan untuk mengetahui penggunaan aturan organisasi dan kerjasama, pembagian tugas yang jelas dan sikap tanggungjawab staf.

5. Evaluasi dan Pertanggungjawab

   Indikator ini digunakan untuk memahami bagaimana pertanggungjawaban dilakukan, kepada siapa, dan kenapa dilakukan. Indikator ini juga digunakan untuk mengetahui siapa yang melakukan evaluasi, bentuk pengawasan, serta upaya pendampingan yang dilakukan terhadap SRS.

6. Menjaga Relasi dengan Publik

   Indikator ini digunakan untuk mengetahui bagaimana SRS mampu berkomunikasi dengan masyarakat, bentuk akuntanilitas yang diberikan kepada masyarakat, serta upaya pemberdayaan.

7. Menjaga Kepercayaan Donor

   Indikator ini digunakan untuk mengetahui hubungan SRS dengan donor, pertanggungjawaban, serta alasan SRS melakukan akuntabilitas kepada donor.

Selain indikator keberhasilan akuntabilitas LSM tersebut, penelitian ini juga menggunakan teori Parker *and* Gould dalam Jurnal Transformasi Nilai Budaya Lokal dalam Membangun Akuntabilitas Sektor Publik yang ditulis oleh Randa dan Fransiskus; Tandon dalam Jurnal Akuntabilitas Eksistensi Ornop dalam Perspektif *Governance* yang ditulis oleh Hermawan; serta Jordan and Peter (2009:166-196) tentang definisi dan bentuk Ornop, serta pentingnya akuntabilitas donor.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan supaya peneliti dapat mengetahui keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja. Adapun tempat yang menjadi lokasi penelitian yaitu Kabupaten Lampung Timur. Alasan peneliti memilih Kabupaten Lampung Timur sebagai lokasi penelitian adalah disesuaikan dengan lokasi konservasi SRS yang menjadi objek penelitian.

Pemilihan SRS sebagai lokasi utama penelitian karena SRS sebagai satu-satunya unit/program dari Ornop profesional di Indonesia yang berfokus pada konservasi badak sumatera sebagai salah satu hewan langka di dunia. Selain itu, unit ini juga cukup banyak bermitra dengan LSM lain yang berfokus pada bidang yang sama di dalam dan di luar negeri. SRS dalam menjalankan programnya bukan hanya didukung oleh para penggiat observasi hewan langka, SRS juga didukung penuh oleh pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Pemerintah Provinsi Lampung bahkan pemerintah pusat dan negara-negara lain

dalam bentuk bantuan moral dan formil serta sebuah kerja sama nyata penyelamatan badak sumatera.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama dalam penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui pengamatan langsung peneliti dan melalui wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya sesuai dengan permasalahan keberhasilan akuntabilitas SRS.

2. Data Sekunder

Data sekunder menurut Hikmat (2011:72) adalah data yang berperan sebagai data pendukung yang fungsinya menguatkan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa naskah, dokumen resmi, laporan pertanggungjawaban, literatur, artikel, koran dan lain sebagainya yang berkaitan dengan keberhasilan akuntabilitas SRS sebagai unit dari organisasi non pemerintah profesional.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang sesuai panduan wawancara dengan bahasa sederhana sehingga mudah dimengerti dan dipahami maksud dari pertanyaan yang diberikan peneliti. Narasumber dan peneliti kemudian melanjutkan pembicaraan dan tanya jawab yang masih dalam lingkup topik wawancara

secara non formal untuk menghindari kesan memojokkan narasumber dengan pertanyaan yang diberikan peneliti. Wawancara yang dilakukan peneliti adalah bertemu secara langsung dengan enam narasumber yaitu manajer SRS, Kabag Humas BTNWK, *keeper* SRS, Staf Bagian Perizinan BTNWK, Staf Bagian Program dan Evaluasi, dan Kepala Desa Labuhan Ratu 9. Kemudian untuk wawancara kepada Kabag Infokom YABI dilakukan via telefon, hal ini dilakukan karena jarak yang jauh dan belum memungkinkan untuk melakukan wawancara secara langsung.

Wawancara dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan data atau informasi yang mendalam tentang topik yang diteliti sehingga peneliti dapat menghasilkan data yang lebih terperinci dan akurat mengenai keberhasilan akuntabilitas SRS. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap orang-orang atau instansi yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung yang mampu secara akurat memberikan data yang berkaitan dengan keberhasilan akuntabilitas SRS. Informan yang di wawancarai untuk mendapatkan data dalam penelitian ini dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Daftar Informan

No	Nama	Jabatan/ Instansi	Data yang Didapatkan
1	Sumadi Hasmaran	Manajer/ SRS	Manajerial SRS, mekanisme pertanggungjawaban
2	Gojek (bukan nama sebenarnya)	*Keeper* 1/ SRS	Pelaksanaan teknis pengurusan badak sumatera, penyaluran informasi kepada masyarakat
3	Yusrona	Staf Bagian Perizinan/ BTNWK	Hubungan kerjasama BTNWK dengan SRS dan SRS dengan mitra LSM lain, pendampingan BTNWK terhadap SRS
4	Sukatmoko	Kepala Bagian Hubungan	Kemitraan TNWK dengan YABI, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan program

Lanjutan Tabel 1.

		Masyarakat/ BTNWK	kerja SRS, pendampingan SRS, mekanisme evaluasi dan penilaian SRS, penanganan konflik
5	Mufli	Staf Bagian Program dan Evaluas/i BTNWK	Pembuatan program kerja SRS, koordinasi program kerja, evaluasi program kerja
6	Sukriyono	Kepala Desa binaan SRS (Desa Labuhan Ratu 9)	Penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap SRS, pemberdayaan yang diterima, hubungan dan komunikasi masyarakat dnegan SRS, dampak yang dirasakan masyarakat terhadap kehadiran SRS
7	Nuke Arincy	Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi/ YABI	Informasi tentang pelaporan pertanggungjawaban SRS kepada donor dan informasi tentang data yang boleh dan tidak boleh dipublikasikan.

Sumber: *Diolah Oleh Peneliti Tahun 2017*

2. Observasi

Marshall dalam Sugiyono (2011:309) mengatakan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku beserta maknanya. Penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipasi pasif, artinya peneliti tetap bisa mengamati objek penelitian tanpa harus mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diteliti. Peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi konservasi SRS dan kantor BTNWK untuk dapat mengamati sendiri fenomena yang terjadi sehingga mampu menjadi sumber data yang utama bagi penelitian ini. Berikut ini adalah lokasi observasi dan informasi yang diperoleh peneliti.

Tabel 2. Hasil Observasi Penelitian

No	Objek Observasi	Informasi yang Diperoleh
1	Lokasi konservasi SRS	- Perilaku dan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing pegawai dan manajer SRS. - Alur koordinasi yang terjalin antar staf SRS - Mekanisme perizinan dan administrasi kunjungan dan penelitian ke SRS - Sikap dan tanggapan manajer SRS atas laporan yang diterima - Fasilitas olahraga dan *hotspot wifi* - Pengawasan oleh Polhut BTNWK - Sikap kooperatif manajer terhadap media yang akan

Lanjutan Tabel 2.

		melakukan liputan
2	Kantor BTNWK	- Perilaku kerjasama yang terjalin antara SRS dengan BTNWK - Pengawasan - Bentuk tanggungjawab - Pola kordinasi - Pengurusan administrasi bagi setiap kunjungan ke SRS yang cepat namun tetap sesuai prosedur - Rapat kordinasi dengan para mitra LSM
3	Desa Labuhan Ratu 9	- Menerima keberadaan SRS - Menjadikan reog ponogoro sebuah kebanggan - Kebersamaan dan keaktifan desa yang bagus - Keramahan para staf SRS kepada masyarakat desa - Pengumpulan pakan tambahan badak oleh warga - Membanggakan hubungan baik selayaknya keluarga yang terjalin dengan SRS

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui lokasi observasi yang dilakukan peneliti serta informasi yang diperoleh dapat membantu menjawab permasalahan penelitian. Dalam melakukan observasi, peneliti mengalami hambatan, yaitu kesulitan mendapatkan dokumen berupa SOP, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) program dan dokumentasi kegiatan berupa foto. SRS beralasan bahwa data-data tersebut bukan menjadi kewenangannya memberikan kepada pihak lain diluar YABI, pihak yang berwenang memberikan data-data tersebut hanya YABI sebagai induk dari SRS.

3. Dokumentasi

Sugiyono (2011:326) mendefinisikan dokumen sebagai catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dari dokumentasi merupakan data yang mendukung data sekunder berupa data tertulis, arsip maupun gambar yang berkaitan dengan bukti-bukti yang menunjukkan keberhasilan akuntabilitas SRS dalam menjalankan masa kerjanya selama ini sebagai unit dari YABI sebagai Ornop profesional konservasi badak sumatera.

Berikut adalah dokumen yang didapatkan dari penelitian ini sebagai pendukung data sekunder.

Tabel 3. Daftar Dokumen yang Didapatkan

No	Dokumen	Substansi
1	Perjanjian Kerjasama YABI dengan BTNWK Nomor: 06/PKS/YABI/VII/2013	Berisi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam menjalankan kerjasama, ruang lingkup kerjasama, arahan program dan Rencana Operasional (RO), pemanfaatan hasil kerjasama dan status kepemilikan peralatan, jangka waktu kerjasama, pembatasan kegiatan, dan penyelesaian sengketa.
2	Rencana Kerja Tahunan SRS Tahun 2015	Berisi tentang rencana kerja SRS dalam jangka waktu satu tahun
3	Nota Kesepahaman Antara Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) dengan YABI tentang Konservasi Badak Jawa dan Badak Sumatera Nomor: 02/MoU-YABI/VI/2011	Ruang lingkup, pelaksanaan, jangka waktu, pembiayaan, monitoring dan evaluasi kegiatan MoU YABI dengan Dirjen PHKA yang akan dilaksanakan kerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu BTNWK
4	Buku Profil YABI Tahun 2016	Sejarah peleburan YMR dan SRS kedalam YABI, Visi dan Misi, upaya perlindungan, pengembangan kelompok, penangkaran dan pengembangbiakan, informasi dan komunikasi, serta kerjasama penggalangan dana

Sumber: *Diolah Oleh Peneliti Tahun 2017*

Berdasarkan Tabel 3 tersebut, peneliti terbantu dalam menyusun hasil penelitian dan melakukan pembahasan penelitian. Hasil penelitian yang lebih banyak didapatkan berdasarkan wawancara dan observasi, dilengkapi oleh data berupa dokumen yang peneliti dapatkan selama penelitian. Dokumen-dokumen tersebut juga menjadi data penguat dari data sekunder yang digunakan peneliti dalam menganalisis keberhasilan akuntabilitas SRS.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2011:333), analisis data telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Namun, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data versi Miles dan Huberman.

1. Reduksi Data

Dalam penelitian ini, data primer dan data sekunder yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang memadai dan akurat akan dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema dan pola sesuai dengan fokus penelitian untuk menjawab permasalahan keberhasilan akuntabilitas SRS. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

2. Penyajian Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011:339) mengatakan bahwa penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Pada penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, tabel, foto dan gambar sejenisnya untuk menjelaskan hasil reduksi data tentang keberhasilan akuntabilitas program SRS, tetapi peneliti lebih banyak menggunakan teks naratif. Melalui penyajian data, data tentang

akuntabilitas SRS lebih mudah diorganisasikan dan disusun pola hubungannya sehingga mudah dipahami.

3. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan merupakan kegiatan terakhir dari proses teknik analisis data. Meskipun merupakan kegiatan terakhir, kesimpulan selalu diverifikasi bersamaan dengan bertambahnya data yang diperoleh peneliti dilapangan. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengambil intisari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan sumber data primer dan sekunder sehingga diperoleh jawaban tentang permasalahan keberhasilan akuntabilitas SRS.

G. Teknik Keabsahan Data

1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Penetapan derajat kepercayaan dalam penelitian ini menggunakan cara pengujian triangulasi. Melalui teknik triangulasi, peneliti membandingkan data hasil wawancara dari berbagai sumber yang dilakukan dengan teknik atau cara pengumpulan data yang berbeda dalam berbagai waktu yang berbeda. Peneliti juga membandingkan data-data sekunder terkait keberhasilan akuntabilitas SRS yang diperoleh dari berbagai sumber berbeda. Teknik ini sangat berguna untuk membandingkan dan membuktikan keakuratan data yang diperlukan untuk dapat menjawab persoalan keberhasilan akuntabilitas program SRS. Peneliti juga menyertakan kecukupan teori atau referensi yang berakitan dengan

keberhasilan akuntabilitas SRS untuk menguji analisis dan penafsiran data hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi di lapangan.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Data hasil penelitian tentang keberhasilan akuntabilitas SRS yang telah dibuktikan keakuratannya selanjutnya dijelaskan oleh peneliti dalam bentuk laporan dengan uraian yang rinci, jelas, dan sistematis sehingga dapat dipercaya oleh orang lain yang membaca atau mengaplikasikan hasil penelitian ini.

3. Kebergantungan (*Dependability*)

Melalui teknik uji kebergantungan, penelitian ini diaudit keseluruhan prosesnya. Hal ini untuk memastikan bahwa laporan peneliti merupakan data yang diperoleh di lapangan, bukan data yang didapat dari sumber lain yang tidak terpercaya. Teknik ini mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian, mulai dari menentukan fokus masalah, memasuki lapangan, menentukan sumber data, sampai membuat kesimpulan. Untuk dapat mengetahui dan mengecek serta memastikan bahwa penelitian ini salah atau benar, peneliti mendiskusikannya dengan dosen pembimbing secara bertahap mengenai konsep di lapangan. Setelah hasil penelitian benar, diadakan seminar terbuka dan tertutup yang dihadiri oleh teman sejawat, pembimbing dosen dan pembahas dosen.

4. Kepastian (*Comfirmability*)

Pengujian kepastian dalam penelitian ini mengaitkan hasil penelitian tentang keberhasilan akuntabilitas SRS dengan proses penelitian yang

dilakukan dilapangan. Melalui teknik keabsahan data kepastian ini, peneliti mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya. Teknik ini digunakan peneliti untuk membuktikan bahwa hasil penelitian ini merupakan hasil dari proses pengamatan langsung dan pengolahan data oleh peneliti sendiri, bukan dari sumber lain yang tidak dapat dipercaya. Ukuran kepastian untuk hasil penelitian tentang keberhasilan akuntabilitas SRS ini adalah diterimanya hasil penelitian ini oleh semua orang.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Yayasan Badak Indonesia

Dalam upaya membantu Pemerintah Indonesia melestarikan spesies badak, telah pernah terbentuk beberapa organisasi nirlaba yang kegiatan dan tujuannya adalah melestarikan satwa badak Indonesia, yaitu YMR dan YSRS. YMR berdiri pada tahun 1990 dan telah melaksanakan berbagai kegiatan pelestarian badak. YMR bersama-sama dengan Ditjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA) (sekarang PHKA) menerbitkan buku pedoman Strategi Konservasi Badak Indonesia yang didanai oleh BII pada tahun 1993. YMR bersama-sama dengan Pemerintah Indonesia c.q Ditjen PHKA Departemen Kehutanan, IRF, dan ARSG melaksanakan kegiatan proyek pelestarian badak yang didanai oleh UNDP yaitu RAS G32- *Conservation Strategy for Rhinoceros in South East Asia* (Indonesia dan Malaya) tahun 1994-1998. Setelah proyek tersebut berkahir, YMR bersama dengan Ditjen PHKA, IRF dan ASRG melanjutkan proyek tersebut dengan membentuk Program Konservasi Badak Indonesia (PKBI).

Memorandum of Understanding (MoU) ditandatangani di Jakarta pada tanggal 14 Januari 1998 kemudian diperpanjang pada tanggal 2 Oktober 2003 dan berakhir pada Desember 2008. PKBI seperti halnya proyek RAS G32 bertujuan

membentuk unit-unit anti perburuan badak atau *Rhinos Protection Unit* (RPU) dibeberapa taman nasional yang dihuni badak sumatera dan jawa.

Yayasan *Sumatran Rhino Sanctuary* (YSRS) dibentuk pada tahun 1997 atas kerjasama Ditjen PHPA Departemen Kehutanan, IRF, Taman Safari Indonesia dan YMR. YSRS mengelola SRS didalam kawasan TNWK, Lampung. Konservasi SRS adalah pusat konservsi badak sumatera yang dibangun atas kesadaran pentingnya membangun sebuah pusat konservasi bagi hewan-hewan yang tidak dapat hidup dan berkembang didalam kebun binatang, salah satu yang menjadi prioritas adalah membuat sebuah tempat semi-insitu bagi badak sumatera. Berdiri berdasarkan rekomendasi Loka Karya Pengembangan Suaka Badak Sumatera tahun 1994 di Safari Garden Hotel, Cisarua, Bogor, SRS dibangun didalam kawasan TNWK pada tahun 1997 berdasarkan hasil penyeleksian terhadap beberapa kawasan potensial sebagai pusat pengembangbiakan badak sumatera, diantaranya adalah TNBBS Sukaraja, TNKS Bangko-Jambi, TNKS Air Seblat, dan TNGL Sungai Lepan.

Atas kesepakatan pembina dan pengurus YMR, YSRS, Ditjen PHKA dan IRF selaku donor utama dari kedua yayasan tersebut, memandang perlu untuk mengembangkan yayasan-yayasan tersebut menjadi satu yayasan yang mengelola kegiatan konservasi badak di Indonesia, yaitu YABI yang kemudian dibentuk pada 28 Desember 2006 dengan Akta Notaris Nomor 34 yang dibuat dihadapan Notaris Anita Munaf, SH., di Bogor. Pembentukan YABI juga disahkan oleh Kementrian Hukum dan HAM Nomor C-950.HT.01.02 Tahun 2007 pada 20 Maret 2007.

Melalui rapat gabungan badan penyantun dan badan pengurus dari YMR dan YSRS pada tanggal 24 Agustus 2007 di Jakarta, memutuskan untuk membubarkan diri dan menggabungkan keduanya kedalam YABI. PKBI mendapatkan persetujuan untuk bergabung dengan YABI dari Ditjen PHKA sebagai penandatangan MoU yang disampaikan melalui surat Ditjen PHKA Nomor S.63/IV-KKH/2007 tanggal 18 Januari 2007. Persetujuan bergabung tersebut telah diberikan oleh badan pembina. Serah terima kepada YABI sebagai satu-satunya yayasan nirlaba di Indonesia yang khusus berdedikasi untuk melestarikan badak asli Indonesia, yaitu badak jawa dan sumatera.

B. Visi YABI

Dalam melakukan tugas fungsi utamanya, SRS memiliki visi yang sama dengan visi YABI, yaitu terwujudnya kehidupan populasi badak jawa dan badak sumatera yang lestari dalam habitat yang aman secara berkelanjutan.

C. Misi YABI

Misi SRS merupakan misi YABI, yaitu untuk ikut melestarikan badak jawa dan badak sumatera melalui upaya perlindungan dan pemantauan terhadap populasi dan habitat, peningkatan pengembangbiakan, riset dan pengembangan, penyadartahuan dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap keberadaan dan perlunya usaha-usaha konservasi badak jawa dan badak sumatera, menjalin kerjasama dan penggalangan dana untuk keberlanjutan program dan kegiatan konservasi badak.

D. Penangkaran dan Pengembangbiakan

Sumatran Rhino Sanctuary di TNWK yang dibangun tahun 1997 dan mulai beroperasi tahun 1998 merupakan bentuk terakhir bagi penyelamatan badak sumatera asal Indonesia yang gagal bertahan hidup dan berkembangbiak di kebun binatang. SRS dikelola terprogram dan terpadu dengan konsep semi in-situ, artinya meskipun badak berada dalam sebuah tempat yang dibatasi, namun badak tetap dipelihara dalam hutan sealami mungkin dengan pemenuhan kebutuhan hidup yang jauh lebih alami daripada dikebun binatang.

Pemeliharaan badak sangat membatasi campur tangan manusia namun tetap dalam pengawasan yang intensif. Pengamatan yang dilakukan setiap hari mengutamakan perhatian terhadap kesehatan badak, mempelajari bagaimana mempertahankan dan memonitor kesehatan badak, upaya reproduksi dengan mengupayakan ketepatan waktu penggabungan atau *breading*.

1. Tujuan SRS

a. Program SRS menghasilkan anak badak sebanyak-banyaknya dalam kondisi yang aman baik untuk badak, manusia dan lingkungannya;
b. SRS sebagai pusat perkembangbiakkan (*breading*), penelitian dan informasi badak sumatera;
c. SRS sebagai asuransi keberadaan badak sumatera.

2. Manfaat

a. Pusat penelitian mendalam tentang ekologi dan perilaku badak sumatera;

b. Merupakan sasaran antara pembentukan populasi kedua badak sumatera.

3. Keberhasilan SRS

a. SRS mampu mengembangbiakkan badak sumatera, terbukti dari keberhasilan kelahiran dua anak badak pada tahun 2012 dan 2016;
b. SRS telah berhasil menemukan perilaku *breading* badak sumatera;
c. SRS berhasil menemukan siklus reproduksi individu badak sumatera terutama untuk badak betina "Ratu";
d. SRS berhasil menemukan waktu efektif untuk mempertemukan dan *breading* badak sumatera jantan dan betina sehingga dapat mengurangi resiko cedera dan menghasilkan keturunan;
e. SRS TNWK telah mencatat sejarah penting bagi dunia konservasi badak di Indonesia.

E. Struktur Kepengurusan *Sumatran Rhino Sanctuary*

Struktur organisasi YABI merupakan struktur kepengurusan sekaligus garis kordinasi yang jelas dan ditaati oleh seluruh anggota YABI baik yang berada dikantor pusat atau yang berada dikantor unit daerah. Struktur organisasi YABI terdiri dari pembina yang ketika dibentuk dan disahkan merupakan orang-orang yang pakar dalam lingkungan hidup dan konservasi alam, sebagian besar dari mereka merupakan pejabat aktif di KLHK. Sampai saat ini, orang-orang yang menjadi pembina YABI merupakan orang-orang yang masih aktif dalam bidang lingkungan hidup dan konservasi alam, ada yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) Komisi IV Bidang Pertanian,

Pangan, Maritim dan Kehutanan. Beberapa anggota lainnya merupakan guru besar di Institut Pertanian Bogor Indonesia dengan bidang konsentrasi reproduksi hewan dan kehutanan. Beberapa anggota yang lain merupakan ketua dan mantan ketua kebun binatang dibeberapa daerah di Indonesia, kemudian ada perwakilan dari IRF yang merupakan donor tetap YABI.

Para pembina YABI bisa dikatakan sebagai orang-orang pertama yang mendirikan YABI. Jika dipahami kembali tentang sejarah berdirinya YABI dan kerjasamanya dengan Dirjen PHKA, maka orang-orang yang pada saat itu sedang menjabat sebagai pegawai aktif dan pengambil keputusan yang berada di KLHK beserta para pakar hewan dan lingkungan hidup dari lembaga pendidikan terkemuka beserta perwakilan donor merupakan orang-orang yang mewakili kesepakatan kerjasama tersebut.

Pembina melalui kesepakatan forum kemudian menujuk pengawas dan pengurus bagi YABI. Pengawas YABI terdiri dari 3 orang yang saat ini sedang aktif sebagai Kepala Pusat Konservasi KLHK, Direktur Utama Taman Safari Indonesia II, dan Ketua Komisi Nasional Sumber Daya Genetik. Sedangkan pengurus YABI sendiri terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara yang dipilih sesuai dengan kriteria dan kemampuan. Kemudian dibawah pengurus ada pelaksana program yang terdiri dari Manajer Operasional dan Umum, Manajer Perlindungan Wilayah Jawa, Manajer Perlindungan Wilayah Sumatera, Manajer SRS, Manajer *Fundraising*, Riset dan Pendidikan, Kordinator Proyek YABI, Keuangan, HRD, Database, Infokom, Kordinator Habitat JRSCA, dan *Officer*. Struktur organisasi YABI terus berlanjut sampai pada staf paling

bawah yang ada dibawah beberapa bagian tersebut, seperti SRS yang memiliki staf: 3 dokter, 1 admin yang berkordinasi langsung dengan manajer, 12 *keepers* yang berada dibawah kordinasi dokter, 2 *cooker*, 5 Polhut, 1 *cleaning service*, 2 *driver*, dan 6 *food colector*. Berikut adalah bagan struktur organisasi YABI:

Struktur Koordinasi Organisasi

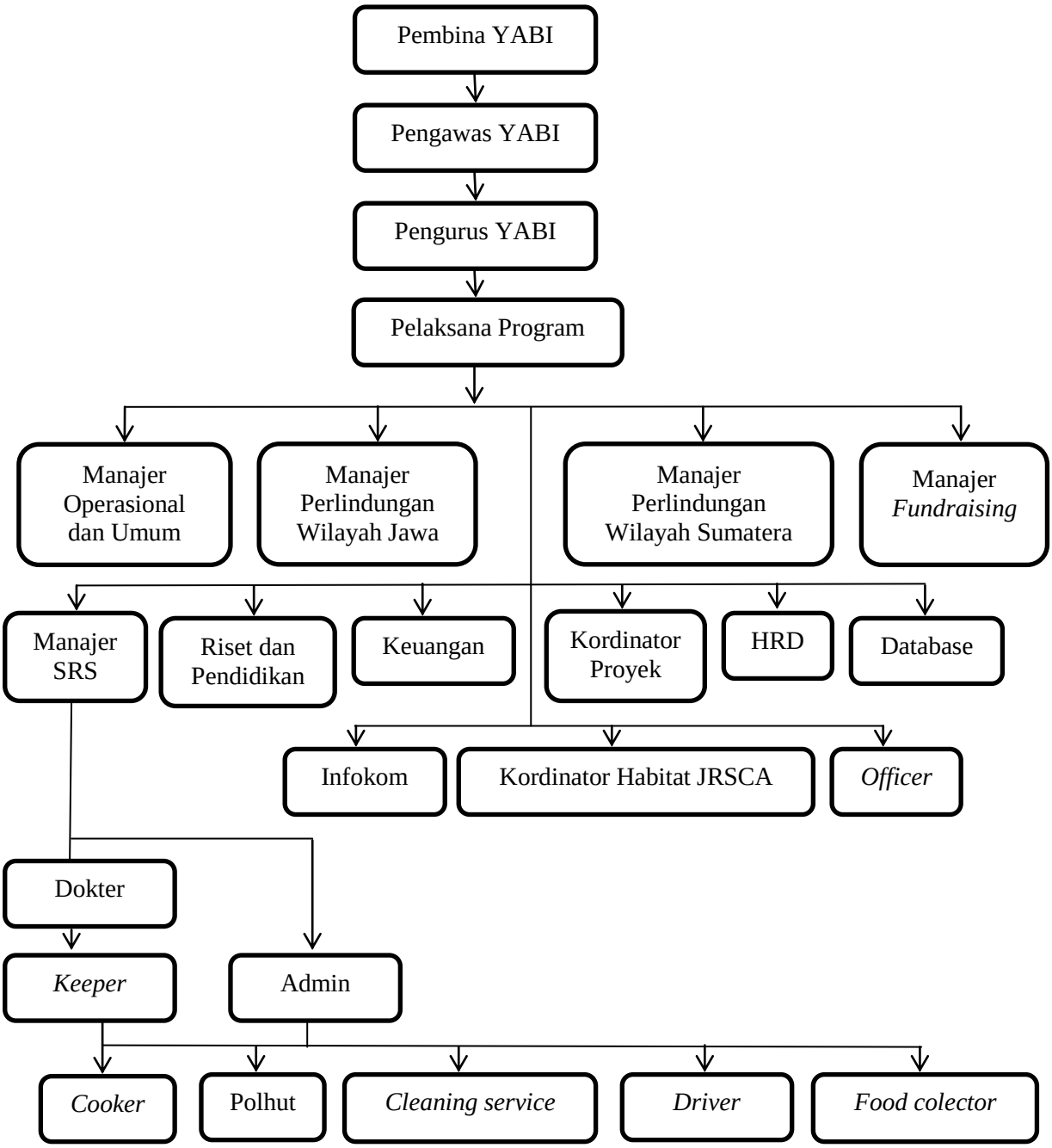

Gambar 2. Bagan Kepengurusan *Sumatran Rhino Sanctuary*

Sumber: Diolah Oleh peneliti Tahun 2017

F. Ruang Lingkup Kegiatan *Sumatran Rhino Sanctuary*

Kegiatan yang dilakukan oleh SRS merupakan refleksi dari program-program dan visi misi YABI yang kemudian diturunkan menjadi program harian, program jangka pendek, dan program jangka panjang. Berikut adalah ruang lingkup kegiatan dan program turunan SRS berdasarkan perjanjian kerjasama YABI dan BTNWK:

1. Kesehatan (Andalas, Andatu, Ratu, Rosa, dan Bina);
2. Perilaku Badak;
3. Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Badak (Andatu);
4. Reproduksi;
5. Genetik;
6. Pakan-Nutrisi;
7. Habitat;
8. Kebun Pakan Badak;
9. *Mapping Paddock Facility;*
10. Pengembangan SRS.

G. Kegiatan yang Pernah dan Sedang Dilakukan *Sumatran Rhino Sanctuary*

1. Pemeriksaan darah rutin setiap bulan;
2. Pemeriksaan darah rutin setiap 3 bulan untuk Hepatitis B, *Tuberculosis*, dan *Salmonella*;
3. Pemeriksaan ulas darah;
4. Pemeriksaan urin rutin setiap bulan;

5. Pemeriksaan khusus (kandungan *calcium, electrolite,* dan besi) setiap 3 bulan;
6. Pemeriksaan mata;
7. Pemeriksaan cula;
8. Pemeriksaan *fecal* (parasit): *protozoa, helminth*, bakteri;
9. Pemeriksaan ektoparasit;
10. Pemeriksaan residu pestisida setiap tahun dari pakan yang di *supply;*
11. Pemeriksaan enzim air liur, kulit dan rambut;
12. Pemeriksaan gigi rutin setiap bulan dengan manual, setiap tahun dengan *X-ray*, dan foto dental;
13. Biakan setiap 6 bulan sampel *fecal, urine, darah, serous, mucous, discharge;*
14. Vaksinasi tetanus dan *deworming;*
15. Pemeriksaan awal gangguan *patology* atau *cancer*/ tumor;
16. Database (*Subjected, Objective, Assessment, Plan*);
17. Link dengan Balai Penyidikan Penyakit Veteriner (BPVV) Lampung, Balai Besar penelitian Veteriner (Balitvet) Bogor, universitas, dan lain-lain. Membuat MoU pemeriksaan, penelitian atau kerjasama;
18. Aktivitas Harian, mingguan, dna bulanan;
19. *Saltlick;*
20. Perubahan cuaca dan kesehatan;
21. Membandingkan dengan perkembangan pertumbuhan dan perkembangan anak badak sumatera lain;
22. Video pengamatan aktivitas badak;

23. GPS *tracking* atau *radio collar;*
24. Pengamatan suara badak;
25. Melanjutkan pengamatan dan pencatatan perilaku perkawinan;
26. Pengukuran jejak kaki;
27. Latihan untuk pengambilan darah setiap hari;
28. Video pengamatan anak badak dengan CCTV;
29. Pengukuran pertumbuhan gigi dengan *X-ray* gigi portabel tanpa menggunakan pembius;
30. Pertumbuhan dan pertukaran rambut;
31. Pengukuran ukuran *fecal* berdasarkan umur termasuk *fecal* pertama kali;
32. Pengkuruan pertumbuhan cula;
33. Fisiologi reproduksi;
34. Siklus birahi dan masa birahi;
35. Semen (*spermatozoa*);
36. Hormon: metabolisme hormon studi dari sampel urin dan *fecal;*
37. Darah baru untuk pengembangan SRS setelah 5 tahun (2018);
38. Pemeriksaan genetik;
39. Kultur *fibroblast* dari badak di SRS;
40. Herbarium pakan badak: identifikasi jenis tumbuhan pakan badak;
41. Nutrisi dan anti nutrisi: *analysis proximate* pertumbuhan pakan badak;
42. Membandingkan pakan badak di SRS dengan yang liar;
43. Pemeriksaan residu pestisida setiap 6 bulan dari pakan badak dan darah badak;
44. Manajemen pengambilan pakan tambahan untuk keberlanjutan;

45. Referensi pakan badak yang baik;
46. Habitat: manajemen rotasi lokasi badak;
47. Tumbuhan berkhasiat obat: analisa pakan khusus untuk badak normal, sakit, hamil, melahirkan termasuk menyusui dan pakan untuk anak badak;
48. Biogas dari kotoran badak;
49. Pengamatan pertumbuhan pakan badak dari *fecal* (kompos);
50. Membuat buku pakan badak;
51. *New exhibit* yang terintegrasi dengan *visitor center* dan laboratorium baru (proposal);
52. Tanah (mineral dan mikrobiologi);
53. Kubangan (mineral dan *micro algae*);
54. Sumber air (mineral dan mikrobiologi);
55. Suhu;
56. Kelembaban;
57. Curah hujan;
58. Pengaruh SRS terhadap satwa liar lainnya;
59. Kebun Pakan Badak;
60. Pemetaan fasilitas *paddock*;
61. Pengembangan areal SRS.

H. Kerjasama dengan Lembaga atau Instansi Lain

Upaya pengelolaan konservasi dua jenis badak di Indonesia, yaitu badak jawa dan badak sumatera, tentunya perlu didukung dengan adanya ketersediaan dana yang memadai. YABI baik sebelum dan sesudah terbentuknya telah

mendapatkan pendanaan terbesar dari IRF, saat ini telah mendapatkan dukungan dari beberapa donor potensial seperti *World Wide Fund for Nature* (WWF) Indonesia, *Save the Rhino International*, IUCN, TFCA Sumatera, Makin Group, *Taronga Conservation Society*, Taman Safari Indonesia dan USAID dengan presentasi masih relatif sangat kecil (kurang dari 20% dari donasi yang diterima dari IRF).

Penggalangan dana, baik secara internasional (melalui IRF), maupun secara nasional yang merupakan tanggungjawab YABI dapat dilakukan secara kolaborasi dengan lembaga lain, baik pemerintah maupun LSM yang masing-masing mempunyai potensi tersendiri dan khas dalam upaya konservasi dilapangan. Dengan kolaborasi multi pihak, tentunya upaya konservasi kehati, khususnya dua jenis badak Indonesia akan lebih optimal dan tolak ukur keberhasilannya akan lebih banyak dilihat secara nyata.

Dalam melakukan kegiatan perawatan badak, SRS bekerjasama dengan BTNWK sebagai Unit Pelaksana Teknis dari KLHK. Secara geografis, SRS yang berada dalam kawasan hutan TNWK merupakan bagian tanggungjawab BTNWK. Kemudian dalam melakukan kegiatan perkembangbiakan dan penelitian, SRS banyak bekerjasama dengan pusat penelitian hewan dan penyakit dikarenakan SRS belum memiliki laboratirum sendiri, diantaranya SRS bekerjasama dengan Rumah Sakit Mardi Waluyo Metro, Fakultas Kedokteran Hewan ITB (FKH IPB), BPPV Lampung, Balai Penelitian Ternak (Balitnak) Bogor, RS Hewan IPB, dan Balitvet Bogor.

Kerjasama juga dilakukan dengan LSM lain yang juga berfokus pada perlindungan lingkungan hidup, diantaranya adalah *Wildlife Conservation Society* (WCS) (berfokus pada kegiatan mitigasi konflik gajah), Aliansi Lestari Rimba Terpadu (Allert) yang berfokus pada reboisasi hutan bekas pengrusakan, RPU (befokus pada pengawasan dan perlindungan kawasan hutan dari tindakan pengrusakan oleh manusia dan/ atau kerusakan akibat hal lain), dan Yayasan Penyelamatan dan Konservasi Harimau Sumatera (PKHS). Bersama-sama dengan organisasi non pemerintah lainnya, SRS melakukan tindakan perlindungan kawasan hutan TNWK dan penyadartahuan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup terutama pada masyarakat yang berada pada desa penyangga.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka ditarik kesimpulan bahwa upaya keberhasilan akuntabilitas program SRS secara nyata belum tercapai. Pelaksanaan program SRS memang telah mampu menjaga kepercayaan donor, menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat yang seharusnya menjadi binaan, dan bahkan SRS telah menunjukkan prestasinya. Namun, dari kacamata akuntabilitas Ornop, SRS justru telah kehilangan keindependenannya akibat para penanggungjawab dan pelaksananya terlalu menuruti kemauan donor, kehilangan fungsinya sebagai unit sebuah Ornop karena tidak melakukan pemberdayaan, tidak terbuka kepada masyarakat, kurang masif melakukan melakukan upaya penyadartahuan dan pengenalan badak sumatera kepada masyarakat luas, tidak pernah melakukan inovasi atau *upgrade* kompetensi staf, dan pusat konservasi SRS menjadi terlalu eksklusif sehingga sulit dijangkau bahkan untuk kepentingan riset dan pendidikan.

B. Saran

1. SRS lebih terbuka dan melakukan transparansi kepada publik. Transparansi yang dimaksud berupa misalnya tentang program kegiatan, target,

kekurangan, kendala, dan hal lain yang tidak termasuk pendanaan. Transparansi tidak akan menggangu kerahasiaan data yang dimiliki SRS, justru dengan transparansi maka fungsi SRS akan terlaksana. Kerahasiaan pendanaan boleh jadi merupakan hak donor dan SRS, namun kerahasiaan data dan program kegiatan adalah bukti dari tidak berjalannya fungsi pendidikan dan penelitian yang juga menjadi tujuan YABI.

2. SRS melakukan akuntabilitas kepada publik, terutama kepada masyarakat desa penyangga yang bersentuhan langsung dan berada paling dekat dengan SRS. Akuntabilitas bisa dilakukan salah satunya dengan membuat program khusus pemberdayaan kemasyarakatan yang masuk dan diagendakan dalam program kerja dengan rincian kegiatan dan pendanaan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. SRS harus responsif terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan internal, masyarakat dan politik kerjasama. Responsif yang disarankan seperti perlunya melakukan pelatihan keorganisasian dan peningkatan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk masa depan SRS, melakukan tindakan yang lebih dari sekedar mengenalkan badak sumatera kepada masyarakat melalui reog ponorogo, dan komunikasi intensif untuk mewujudkan peningkatan hubungan kerjasama dengan mitra.
4. SRS melakukan perluasan target sosialisasi kepedulian, penyadartahuan, dan pemahaman tentang badak sumatera. Kegiatan tersebut bisa dilakukan dilingkup Provinsi Lampung dan bahkan secara nasional diberbagai daerah melalui kerjasama dengan pemerintah, Ornop lain, lembaga riset, atau lembaga pendidikan. Kegiatan ini bukan hanya akan berdampak pada

eksistensi SRS, tetapi juga bantuan dan gerakan nyata untuk edukasi dan demo penyadaran tentang badak sumatera.

5. SRS disarankan lebih aktif dan memperluas jangkauan jaringan *online* seperti *line chat, instagram,* dan lain sebagainya. Hal ini merupakan salah satu upaya adaptasi terhadap perkembangan kebutuhan publik. Melalui media-media *online* seperti yang telah disebutkan, berita dan gerakan nyata untuk membantu dan mendukung perlindungan dan perkembangbiakan badak sumatera lebih masif, diketahui lebih banyak masyarakat dengan jangkauan yang lebih luas, cara yang praktis, efektif namun tetap efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abidin, Hamid dan Mimin Rukmini. 2004. *Kritik dan Otokritik LSM*. Jakarta: Piramedia.

Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Bastian, Indra. 2007. *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*. Jakarta: Erlangga.

_____ . 2007. Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik. Jakarta: Erlangga.

Hikmat, Mahi M. 2011. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jordan, Lisa dan Peter Van T. 2009. *Akuntabilitas LSM*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Santosa, Pandji. 2012. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT Refika Aditama.

Saragih, Sebastian. 1995. *Membedah Perut LSM*. Jakarta: PT Penabar Jaya.

Sedarmayanti. 2013. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Sulistio, Eko B. 2009. *Birokrasi Publik Perspektif Ilmu Administrasi Publik*. Metro: STISIPOL Dharma Wacana Metro.

Siagian, Sondang P. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara

Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah).* Bandung: Mandar Maju.

Skripsi dan Karya Ilmiah

Hermawan, Dedy. 2004. *Akuntabilitas NGO dan Kontrol Publik* (Jurnal Administrasi Publik, Vol.3, No.2), (Online), (journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/download/1535/1475 diakses pada 20 April 2017).

Hermawan, Dedy, dkk. 2011. *Akuntabilitas Eksistensi Organisasi Non Pemerintah dalam Perspektif Governance (Studi terhadap Yayasan Lembaga Pembinaan Masyarakat Desa Lampung)* (Jurnal Borneo Administrator Vol. 7 No. 1), (Online), (samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/view/69 diakses pada 12 Mei 2017).

Randa, Fransiskus dan Fransiskus E. Daromes. 2014. *Transformasi Nilai Budaya Lokal Dalam Membangun Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik* (Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol.5, No.3 Hal.345-510), (Online), (jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/330 diakses pada 20 April 2017).

Wicaksono, Kristian W. 2015. *Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik* (Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik (JKAP) Vol. 19, No. 1). (Online), (https://journal.ugm.ac.id/jkpa/article/view/7523 diakses pada 11 Mei 2017).

Agusetiawan. "Akuntabilitas Kinerja Organisasi Masyarakat Sipil (Studi Kasus di BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Bandar Lampung)". Skripsi Administrasi Negara FISIP UNILA, Bandar Lampung, 2014.

Gustiance, Yeen. "Peranan *Civil Society* dalam Mengatasi Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak (Studi Pada LSM *Children Crisis Centre* (CCC) Lampung)". Skripsi Administrasi Negara FISIP UNILA, Bandar Lampung, 2016.

Website dan Email

Daily Mail. 2014. *Benarkah Manusia Penyebab Kepunahan Hewan?*, (Onl (http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/12/benarkah-manusia-penyebab-kepunahan-hewan diakses pada 05 Januari 2017 pukul 10.20 WIB.

Tim Profauna. 2017. *Fakta tentang Satwa Liar Indonesia*, (Online), (https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.WG27xVOLTIU) diakses 05 Januari 2017 10.28 WIB.

Tim WBH. 2015. *Menjadi Penerus Kelestarian Badak Sumatera*, (Online), (www.wbh.or.id/index.php?option=com_conten&view=article&id=253: menjadi-penerus-kelestarian-badak-sumatera&catid=42:media-lain&itemid=18) diakses pada 25 September 2016 pukul 08.23 WIB.

Bayon, Ricardo dkk. 2001. *Membayar Demi Konservasi Sumber-Sumber Alam*, (Online), (Blog.cifor.org/524/membayar-demi-konservasi-sumber-sumber-alam?fnl=id) diakses pada 28 Maret 2017 pukul 14.18 WIB.

Mongabay. 2016. *Fakta Menarik, Mengapa Kehidupan Badak Harus Kita Jaga*, (Online), (http://bbksdajatim.org/fakta-menarik-mengapa-kehidupan-badak-harus-kita-jaga.php) diakses pada 9 April 2017 pukul 17.14 WIB.

Sumber: http://badak.or.id/pengembalian-badak-sumatera-harapan-dari-cincinnati-zoo-ke-suaka-rhino-sumatera-srs-taman-nasional-way-kambas/ diakses pada 09 Mei 2017 pukul 10.03 WIB.

Nuke Arincy. (arincynuke11@gmail.com). 27 April 2017. *Company Profile Yayasan Badak Indonesia*. E-mail kepada Uun Nuraini (uunna77@gmail.com).

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.